



2026 RANCANGAN AKHIR RENJA

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas impahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2026 telah dapat diselesaikan.

Penyusunan RANCANGAN AKHIR RENJA ini dimaksudkan agar Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto dapat memberikan arah kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 kepada publik atas amanat yang diemban sekaligus mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Rancangan RENJA ini kami sampaikan banyak terima kasih dan semoga apa yang telah kita perbuat ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat, pemerintah dan khususnya bagi lembaga Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto

Akhirnya saran dari para pengguna RANCANGAN AKHIR RENJA ini akan menjadi bahan untuk perbaikan yang akan lebih menyempurnakan untuk penyusunan RANCANGAN RENJA di tahun-tahun mendatang

Mojokerto, Juli 2025

KEPALA DP2KBP2 KAB.MOJOKERTO



SUGENG NURYADI, S.IP.,MM
Pembina Tk. I
NIP. 19681010 198903 1 008

DAFTAR ISI

Pengantar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	i
Daftar Isi	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ii
Daftar Tabel	.	.	.	.	.	.	.	.	.	iii
BAB I	PENDAHULUAN									
	1.1	Latar Belakang.	.	.	.	.	.	.	.	1
	1.2	Landasan Hukum	.	.	.	.	.	.	.	2
	1.3	Maksud dan Tujuan	.	.	.	.	.	.	.	6
	1.4	Sistematika Penulisan.	.	.	.	.	.	.	.	7
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2025									
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025	.	.	.	.	.	.	.	11
	2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Tahun 2025	.	.	.	.	.	.	.	58
	2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	.	.	.	.	.	.	.	83
	2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	.	.	.	.	.	.	.	86
	2.5	Penelaah Usulan Program dan Kegiatan.	.	.	.	.	.	.	.	95
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN									
	3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	.	.	.	.	.	.	.	97
	3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2026.	.	.	.	.	.	.	.	99
	3.3	Program dan Kegiatan	.	.	.	.	.	.	.	100
BAB IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.									128
BAB V	PENUTUP									181

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Evaluasi Renja Tahun 2025 (Triwulan I) – hal 12
Tabel 2.1.1	: Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah – hal 35
Tabel 2.2	: Pencapaian kinerja Pelayanan DP2KBP2 – hal 59
Tabel 2.2.1	: Analisa Capaian Kinerja 2024 - hal 61
Tabel 2.2.2	: APE Menurut Kategori Nilai dari Tahun 2020 sd 2024 – hal 64
Tabel 2.2.3	: KLA Menurut Kategori Nilai dari Tahun 2020 sd 2024 – hal 66
Tabel 2.2.4	: Pencapaian Peserta KB Aktif di Kabupaten Mojokerto bulan Desember Tahun 2024 – hal 67
Tabel 2.2.5	: Pencapaian Pesrta KB Aktif Per Mix Kontrasepsi – hal 68
Tabel 2.2.6	: Perbandingan Prevalensi KB Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 sd 2024 – hal 68
Tabel 2.2.7	: Prosentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif di Kabupaten Mojokerto – hal 70
Tabel 2.2.9	: Nilai SAKIP dari Tahun 2021 sd 2024 – hal 72
Tabel 2.2.10	: Nilai Prosentase Realisasi Anggaran DP2KBP2 dari Tahun 2021 – 2024 – hal 73
Tabel 2.2.11	: Proyeksi Realisasi Anggaran sampai dengan Desember Tahun 2024 – hal 74
Tabel 2.2.12	: Nilai IP ASN DP2KBP2 dari Tahun 2021 sd 2024 – hal 78
Tabel 2.3	: Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun Anggaran 2025 – hal 87
Tabel 2.4	: Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun Anggaran 2025 – hal 95
Tabel T-C 33	: Rumusan Rencana Program Kegiatan PD Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 – hal 103
Tabel 4.1	: Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah PAPBD Tahun Anggran 2025 – hal 118

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Adapun proses penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan Renja, penyusunan Rancangan Awal Renja, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan Rancangan Akhir Renja dan penetapan Renja.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah selalu berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub Kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Berkaitan dengan penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renja ini merupakan langkah untuk melaksanakan mandat yang diemban Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 64 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto.

Program Pemberdayaan Perempuan dengan upaya-upaya peningkatan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender dan anak melalui penguatan kelembagaan gender dan anak, meningkatkan kampanye anti trafiking dan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak serta penghapusan bentuk pekerjaan terburuk bagi

anak dan mengeliminir berbagai tindak kekerasan , eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak.

Sementara Program Keluarga Berencana merupakan upaya pokok dalam pengendalian jumlah penduduk melalui pengaturan kelahiran, pendewasaan usia kawin, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga juga merupakan strategi dalam upaya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dengan berorientasi pada kesehatan reproduksi dan penghormatan hak-hak reproduksi seseorang sebagai bagian integral pembangunan nasional.

Untuk itu baik Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan pelaksanaan pada tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto tahun 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024;
 13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanakan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019. Didalamnya memuat kegiatan pengawasan dalam bentuk monitoring dan evaluasi PPRG dan fokus pengawasan urusan pemerintahan Bidang PP dan PA.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan APBD 2020. Didalamnya mencantumkan kewajiban bagi OPD untuk menyusun analisis gender dan menuangkan dalam GBS serta dilampirkan dalam RKA;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Permendagri 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutanaan Gender
29. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan daerah No.9 tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
33. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
34. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
35. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
36. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

37. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga (KKBPK);
38. SK Tim penyusunan renja DP2KBP2 tahun 2025 belum ada; Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Nomor 188/658/416-108/2022 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja 2022;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto tahun 2026 dimaksudkan agar :

- a. Memberikan arah dan pedoman dalam melaksanakan tugas untuk menentukan kegiatan strategis di bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana sehingga program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun satu tahun.
- b. Mempermudah pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, para pemangku kepentingan (stakeholder), monitoring, analisis data, evaluasi/pemantapan program baik secara internal maupun eksternal.
- c. Memberikan informasi ke semua pihak yang berkepentingan untuk memiliki pandangan yang sama secara internal maupun eksternal.
- d. Menjadi acuan bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto dalam upaya mencapai prioritas peningkatan kualitas SDM.

Adapun tujuan disusunnya Rancangan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto tahun 2026 adalah untuk :

- a. Menjabarkan arahan Ranwal Renstra Dinas P2KBP2 Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029 kedalam operasionalisasi program.
- b. Menjabarkan Visi dan Misi Dinas P2KBP2 Kabupaten Mojokerto ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional serta kegiatan indikatif.

- c. Menyediakan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja perangkat daerah sebagai acuan operasional program.
- d. Menentukan strategi untuk peningkatan produktivitas dan menjamin efektifitas penggunaan sumber dana organisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2026 disusun dengan tata urut sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian dengan ringkas, proses penyusunan, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang – undang, peraturan pemerintah, peraturandaerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Awal Renja tahun 2026, rencana dan hubungannya dengan dokumen Renstra dan RPJMD serta isu strategis dan kaitannya dengan Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

1.4. Sistemmatika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun-1), mengacu pada APBD tahun berjalan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Berisi uraian mengenai permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terhadap pencapaian SPM dan MDGs (Millenium Development Goals).

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisi uraian mengenai proses perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi – asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun dari hasil pengumpulan informasi SKPD

Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten.

Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional Provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rentra SKPD.

3.3 Program dan Kegiatan

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi rumusan rencana program, kegiatan dan pagu dana indikatif yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2026 serta prakiraan maju Tahun Anggaran 2027.

Bab V PENUTUP

Bab ini berisi uraian tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Bab ini juga memuat kaidah

pelaksanaan Rancangan Akhir Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2026.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Anggaran yang tersedia untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah pada setiap tahun anggaran di lakukan evaluasi antara anggaran dengan realisasi, dengan memperhatikan unsur ekonomis, efektif, dan efisien. Ekonomis diukur dengan masukan (*input*) anggaran dengan realisasi, sedangkan efisiensi dengan cara membandingkan antara *input* dengan *output*, dan efektifitas dengan cara membandingkan hasil (*outcome*) dengan target yang ditetapkan. Adapun ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto per tanggal 31 Desember 2024 sebesar **96,22 %** sebagai berikut :

Anggaran sebelum Perubahan APBD	Rp. 20.140.239.912,00
Anggaran setelah Perubahan	Rp. <u>20.431.065.412,00</u>
Realisasi	Rp. 19.657.817.756,00
Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran	Rp. <u>2.687.928.345,00</u>

Sedangkan anggaran DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto pada TA. 2024 adalah sebesar Rp 20.431.065.412,00

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto sampai dengan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagaimana tabel berikut :

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkungan Kabupaten

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan

2024

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)	Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2024)	Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi	Realisasi Kinerja Pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan renja)	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel		Nilai SAKIP Perangkat Daerah(Nilai)					84,50 (A)																Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
2		[PROGRAM] 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi Serta Berkelanjutan(Inovasi)		31.547.116.950,00		15.746.791.710,00	1,00	5.653.881.525,00	0,00	1.245.531.417,00	0,00	1.623.554.561,00	0,00	979.455.667,00	1	1218931833	1,00	5.067.473.478,00		20.814.265.188,00		65,98	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
3		[KEGIATAN] 2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai Target(%)		75.000.000,00		36.279.400,00	90,00	11.200.000,00	0,00	3699900	0,00	2400000	0,00	0	90,00	5099700	90,00	11.199.600,00		47.479.000,00		63,31	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan

4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)				2,00	7.000.00 0,00	1,00	2.499.900,0 0	0,00	1.400.000,0 0	1,00	0,00	0,00	3.099.800,0 0	2,00	6.999.70 0,00					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)				1,00	4.200.00 0,00	1,00	1.200.000,0 0	0,00	1.000.000,0 0	0,00	0,00	0,00	1.999.900,0 0	1,00	4.199.90 0,00					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
3		[KEGIATAN] 2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(%)		27.584.0 04.950,0 0	14.222.407. 315,00	89,00	5.267.94 0.000,00	0,00	118165455 0	0,00	154183641 5	0,00	879745424	96,22	112263323 8	96,22	4.725.86 9.627,00		18.948.276. 942,00	68,69		Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)				33,00	5.267.94 0.000,00	0,00	1.181.654.5 50,00	33,00	1.541.836.4 15,00	0,00	879.745.42 4,00	0,00	1.122.633.2 38,00	33,00	4.725.86 9.627,00					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
3		[KEGIATAN] 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah(%)		1.290.00 0.000,00	460.336.79 9,00	90,00	133.262. 675,00	0,00	17253600	0,00	29359930	0,00	44735572	90,00	35169350	90,00	126.518. 452,00		586.855.25 1,00	45,49		Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan

4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					1,00	8.599.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	8.599.000,00	0,00	0,00	1,00	8.599.000,00						Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					240,00	12.000.000,00	60,00	2.940.000,00	0,00	0,00	60,00	2.695.000,00	120,00	6.125.000,00	240,00	11.760.000,00						Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					4,00	14.761.100,00	0,00	0,00	1,00	3.414.500,00	2,00	9.164.000,00	1,00	1.827.000,00	4,00	14.405.500,00						Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan(Dokumen)					6,00	7.180.800,00	1,00	2.018.000,00	2,00	1.710.000,00	2,00	1.710.000,00	1,00	1.710.000,00	6,00	7.148.000,00						Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					4,00	33.721.375,00	1,00	3.740.100,00	1,00	12.088.350,00	0,00	0,00	2,00	12.011.350,00	4,00	27.839.800,00						Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan

4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu(Laporan)				12,00	7.000.00 0,00	2,00	1.735.500,0 0	1,00	0,00	2,00	445.000,00	7,00	4.806.000,0 0	12,00	6.986.50 0,00					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)				140,00	50.000.0 00,00	15,00	6.820.000,0 0	33,00	12.147.080, 00	75,00	22.122.572, 00	17,00	8.690.000,0 0	140,0 0	49.779.6 52,00					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
3		[KEGIATAN] 2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan(%)		1.283.11 1.600,00	343.107.50 5,00	90,00	128.852. 450,00	0,00	28149367	0,00	24180716	0,00	25648972	90,00	27465848	90,00	105.444. 903,00		448.552.40 8,00		34,96	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)				12,00	75.000.4 50,00	3,00	15.224.887, 00	3,00	11.256.236, 00	3,00	12.724.492, 00	3,00	14.541.368, 00	12,00	53.746.9 83,00					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)				12,00	53.852.0 00,00	3,00	12.924.480, 00	3,00	12.924.480, 00	3,00	12.924.480, 00	3,00	12.924.480, 00	12,00	51.697.9 20,00					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
3		[KEGIATAN] 2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milih daerah dalam keadaan baik(%)		1.250.00 0.000,00	638.445.69 1,00	90,00	112.626. 400,00	0,00	14774000	0,00	25777500	0,00	29325699	90,00	28563697	90,00	98.440.8 96,00		736.886.58 7,00		58,95	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan

4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit)				183,00	87.636.4 00,00	5,00	9.865.000,0 0	50,00	21.267.500, 00	60,00	24.697.400, 00	68,00	18.269.300, 00	183,0 0	74.099.2 00,00					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi(Unit)				2,00	4.990.00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.989.000,0 0	1,00	2.566.700,0 0	2,00	4.555.70 0,00					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi(Unit)				21,00	20.000.0 00,00	7,00	4.909.000,0 0	3,00	4.510.000,0 0	4,00	2.639.299,0 0	7,00	7.727.697,0 0	21,00	19.785.9 96,00					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah(%)				84,50		0		0,00		0,00		84,55								
3		[KEGIATAN] 2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai Target(%)		75.000.0 00,00	36.279.400, 00	90,00	11.200.0 00,00	0,00	3699900	0,00	2400000	0,00	0	90,00	5099700	90,00	11.199.6 00,00		47.479.000, 00		63,31	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)				2,00	7.000.00 0,00	1,00	2.499.900,0 0	0,00	1.400.000,0 0	1,00	0,00	0,00	3.099.800,0 0	2,00	6.999.70 0,00					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan

4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)				1,00	4.200.00 0,00	1,00	1.200.000,0 0	0,00	1.000.000,0 0	0,00	0,00	0,00	1.999.900,0 0	1,00	4.199.90 0,00					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
3		[KEGIATAN] 2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(%)		27.584.0 04.950,0 0	14.222.407. 315,00	89,00	5.267.94 0.000,00	0,00	118165455 0	0,00	154183641 5	0,00	879745424	96,22	112263323 8	96,22	4.725.86 9.627,00		18.948.276. 942,00	68,69	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan	
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)				33,00	5.267.94 0.000,00	0,00	1.181.654.5 50,00	33,00	1.541.836.4 15,00	0,00	879.745.42 4,00	0,00	1.122.633.2 38,00	33,00	4.725.86 9.627,00				Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan	
3		[KEGIATAN] 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah(%)		1.290.00 0.000,00	460.336.79 9,00	90,00	133.262. 675,00	0,00	17253600	0,00	29359930	0,00	44735572	90,00	1693500	90,00	126.518. 452,00		586.855.25 1,00	45,49	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan	
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)				1,00	8.599.40 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	8.599.000,0 0	0,00	0,00	1,00	8.599.00 0,00				Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan	

4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					240,00	12.000.000,00	60,00	2.940.000,00	0,00	0,00	60,00	2.695.000,00	120,00	6.125.000,00	240,00	11.760.000,00						Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					4,00	14.761.100,00	0,00	0,00	1,00	3.414.500,00	2,00	9.164.000,00	1,00	1.827.000,00	4,00	14.405.500,00						Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan(Dokumen)					6,00	7.180.800,00	1,00	2.018.000,00	2,00	1.710.000,00	2,00	1.710.000,00	1,00	1.710.000,00	6,00	7.148.000,00						Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					4,00	33.721.375,00	1,00	3.740.100,00	1,00	12.088.350,00	0,00	0,00	2,00	12.011.350,00	4,00	27.839.800,00						Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu(Laporan)					12,00	7.000.000,00	2,00	1.735.500,00	1,00	0,00	2,00	445.000,00	7,00	4.806.000,00	12,00	6.986.500,00						Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan

4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)				140,00	50.000.000,00	15,00	6.820.000,00	33,00	12.147.080,00	75,00	22.122.572,00	17,00	8.690.000,00	140,00	49.779.652,00					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
3		[KEGIATAN] 2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan(%)		1.283.111.600,00	343.107.505,00	90,00	128.852.450,00	0,00	28149367	0,00	24180716	0,00	25648972	90,00	27465848	90,00	105.444.903,00		448.552.408,00		34,96	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)				12,00	75.000.450,00	3,00	15.224.887,00	3,00	11.256.236,00	3,00	12.724.492,00	3,00	14.541.368,00	12,00	53.746.983,00					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)				12,00	53.852.000,00	3,00	12.924.480,00	3,00	12.924.480,00	3,00	12.924.480,00	3,00	12.924.480,00	12,00	51.697.920,00					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
3		[KEGIATAN] 2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milih daerah dalam keadaan baik(%)		1.250.000.000,00	638.445.691,00	90,00	112.626.400,00	0,00	14774000	0,00	25777500	0,00	29325699	90,00	28563697	90,00	98.440.896,00		736.886.587,00		58,95	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit)				183,00	87.636.400,00	5,00	9.865.000,00	50,00	21.267.500,00	60,00	24.697.400,00	68,00	18.269.300,00	183,00	74.099.200,00					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan

4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)				2,00	4.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.989.000,00	1,00	2.566.700,00	2,00	4.555.700,00					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)				21,00	20.000.000,00	7,00	4.909.000,00	3,00	4.510.000,00	4,00	2.639.299,00	7,00	7.727.697,00	21,00	19.785.996,00					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
1	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah		Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan(Inovasi)				1,00															Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan	
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana		Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE)(Nilai)				APE															Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan	
2		[PROGRAM] 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Prosentase kelembagaan daerah yang responsif gender(%)		1.550.000.000,00	606.353.207,00	83,93	42.278.800,00	0,00	1.778.000,00	0,00	11.015.000,00	0,00	10.995.000,00	100	15561842	100,00	39.349.842,00		645.703.049,00		41,66	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
3		[KEGIATAN] 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang melaksanakan anggaran responsif gender(OPD)		750.000.000,00	86.330.292,00	57,00	22.278.800,00	0,00	1550000	0,00	3750000	0,00	10995000	57,00	5230942	57,00	21.525.942,00		107.856.234,00		14,38	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan

4		[SUB KEGIATAN] 2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota(Dokumen)				1,00	22.278.800,00	0,05	1.550.000,00	0,09	3.750.000,00	0,86	10.995.000,00	0,00	5.230.942,00	1,00	21.525.942,00					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
3		[KEGIATAN] 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi wanita dan lembaga penyedia layanan yang mendapat pembinaan(Orang)		500.000.000,00	520.022.915,00	90,00	20.000.000,00	0,00	228000	0,00	7265000	0,00	0	90,00	10330900	90,00	17.823.900,00		537.846.815,00	107,57		Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.08.02.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (Orang)				422,00	20.000.000,00	0,00	228.000,00	304,00	7.265.000,00	1,00	0,00	117,00	10.330.900,00	422,00	17.823.900,00					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
2		[PROGRAM] 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Prosentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan(%)		1.977.465.000,00	450.936.480,00	100,00	81.721.200,00	0,00	13.522.000,00	0,00	24.500.800,00	0,00	17.042.690,00	100	24964590	100,00	80.030.080,00		530.966.560,00	26,85		Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
3		[KEGIATAN] 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lintas sektor yang berperan aktif dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan atau TPPO(Orang)		385.775.000,00	196.475.580,00	65,00	81.721.200,00	0,00	13522000	0,00	24500800	0,00	17042690	65,00	24964590	65,00	80.030.080,00		276.505.660,00	71,68		Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota(Dokumen)				4,00	81.721.200,00	0,40	13.522.000,00	1,20	24.500.800,00	1,00	17.042.690,00	1,40	24.964.590,00	4,00	80.030.080,00					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan

1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana		Kabupaten Layak Anak (KLA)(Nilai)					KLA																Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
2		[PROGRAM] 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Prosentase kecamatan layak anak(%)		1.541.337.000,00		195.688.200,00	44,44	45.575.000,00	0,00	15.035.500,00	0,00	17.220.500,00	0,00	8.611.500,00	100	3097500	100,00	43.965.000,00		239.653.200,00		15,55	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
3		[KEGIATAN] 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan dan desa yang memahami PHA(Orang)		500.000.000,00		161.515.000,00	40,00	45.575.000,00	0,00	15035500	0,00	17220500	0,00	8611500	40,00	3097500	40,00	43.965.000,00		205.480.000,00		41,10	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha(Organisasi)					27,00	45.575.000,00	9,00	15.035.500,00	8,00	17.220.500,00	5,00	8.611.500,00	5,00	3.097.500,00	27,00	43.965.000,00					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
			Prosentase desa kelurahan layak anak(%)					12,50		0		0,00		0,00		100								
3		[KEGIATAN] 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan dan desa yang memahami PHA(Orang)		500.000.000,00		161.515.000,00	40,00	45.575.000,00	0,00	15035500	0,00	17220500	0,00	8611500	40,00	3097500	40,00	43.965.000,00		205.480.000,00		41,10	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan

4		[SUB KEGIATAN] 2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha(Organisasi)				27,00	45.575.000,00	9,00	15.035.500,00	8,00	17.220.500,00	5,00	8.611.500,00	5,00	3.097.500,00	27,00	43.965.000,00						Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
2		[PROGRAM] 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Prosentase korban anak dan ABH (anak yang berhadapan dengan hukum) yang mendapatkan layanan(%)		2.952.445.000,00		437.084.880,00	100,00	97.880.137,00	0,00	12.024.500,00	0,00	21.125.000,00	0,00	42.340.400,00	100	20198080	100,00	95.687.980,00		532.772.860,00		18,05	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
3		[KEGIATAN] 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lintas sektor dan remaja yang berperan aktif dalam pencegahan terhadap anak atau TPPO(Orang)		285.775.000,00		132.604.980,00	30,00	97.880.137,00	0,00	12024500	0,00	21125000	0,00	42340400	30,00	20198080	30,00	95.687.980,00		228.292.960,00		79,89	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.08.07.2.01.0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA(Orang)					10,00	97.880.137,00	2,00	12.024.500,00	4,00	21.125.000,00	2,00	42.340.400,00	2,00	20.198.080,00	10,00	95.687.980,00					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana		Prevalensi KB Aktif(%)					80,30															Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan	
2		[PROGRAM] 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Prosentase Data Program Bangsa Kencana dan Data Keluarga yang dilaporkan(%)		2.360.000.000,00		3.268.064.828,00	100,00	1.450.000.000,00	0,00	292.160.000,00	0,00	413.577.928,00	0,00	411.312.500,00	100	332233400	100,00	1.449.283.828,00		4.717.348.656,00		199,89	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan

3		[KEGIATAN] 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkiraan Pengendalian Penduduk Tahun 2023 yang Dipetakan(Jiwa)		1.350.00 0.000,00		3.100.940.1 28,00	1.169.760	1.450.00 0.000,00	0,00	292160000	0,00	413577928	0,00	411312500	1.169. 760,0 0	332233400	1.169. 760,0 0	1.449.28 3.828,00		4.550.223.9 56,00		337,05	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga(Laporan)					2,00	242.400. 000,00	0,12	0,00	0,88	106.200.00 0,00	0,50	106.200.00 0,00	0,50	30.000.000, 00	2,00	242.400. 000,00					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB(Dokumen)					5,00	1.207.60 0.000,00	1,00	292.160.00 0,00	2,00	307.377.92 8,00	1,00	305.112.50 0,00	1,00	302.233.400 ,00	5,00	1.206.88 3.828,00					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
2		[PROGRAM] 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prosentase PUS yang mendapat pelayanan Keluarga Berencana(%)		45.847.5 50.000,0 0		20.473.770. 306,00	80,30	7.218.66 8.000,00	0,00	777.928.00 0,00	0,00	1.855.083.8 64,00	0,00	2.675.980.8 48,00	80.58	174522211 2	80,58	7.054.21 4.824,00		27.527.985. 130,00		60,04	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
3		[KEGIATAN] 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah media komunikasi program KKBPK(Orang)		16.206.0 50.000,0 0		3.818.277.0 90,00	144,00	1.652.80 0.000,00	0,00	99469100	0,00	4025254 00	0,00	82482000	144.0 0	274104500	144,0 0	1.558.58 1.000,00		5.376.858.0 90,00		33,18	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK(Laporan)					1,00	140.000. 000,00	0,00	22.520.600, 00	0,00	18.802.900, 00	0,00	38.145.000, 00	1,00	31.701.500, 00	1,00	111.170. 000,00					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan

4		[SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)(Laporan)				2,00	892.800.000,00	0,00	59.038.000,00	1,00	204.513.500,00	0,00	442.401.000,00	1,00	153.806.500,00	2,00	859.759.000,00						Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)(Laporan)				18,00	270.000.000,00	3,00	0,00	15,00	67.564.000,00	0,00	135.128.000,00	0,00	66.404.000,00	18,00	269.096.000,00						Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang(Dokumen)				2,00	100.000.000,00	0,30	17.910.500,00	0,70	52.495.000,00	1,00	22.983.000,00	0,00	3.162.500,00	2,00	96.551.000,00						Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja(Organisasi)				12,00	250.000.000,00	1,00	0,00	5,00	59.150.000,00	3,00	143.825.000,00	3,00	19.030.000,00	12,00	222.005.000,00						Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
3		[KEGIATAN] 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah PLKB yang Mendapat Pembinaan Program KKBPk(Orang)		7.087.500.000,00	8.364.054.716,00	60,00	3.458.568.000,00	0,00	407647900	0,00	631541964	0,00	1144042848	60,00	1250443512	60,00	3.433.676.224,00		11.797.730.940,00		166,46		Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan

4		[SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.02.0002 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia(Unit)					2,00	43.200.0 00,00	0,40	10.275.000, 00	0,60	2.800.000,0 0	0,50	17.540.892, 00	0,50	9.940.000,0 0	2,00	40.555.8 92,00						Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)(Orang)					1.828,00	912.000. 000,00	304,00	91.200.000, 00	304,00	273.600.00 0,00	608,00	182.400.00 0,00	612,0 0	364.800.000 ,00	1.828, 00	912.000. 000,00						Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.02.0005 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB(Organisasi)					1,00	1.241.40 0.000,00	0,00	306.172.90 0,00	0,00	210.301.96 4,00	0,00	208.621.95 6,00	1,00	512.103.512 ,00	1,00	1.237.20 0.332,00						Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.02.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)(Laporan)					1,00	1.261.96 8.000,00	0,00	0,00	0,00	144.840.00 0,00	0,70	735.480.00 0,00	0,30	363.600.000 ,00	1,00	1.243.92 0.000,00						Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan

3		[KEGIATAN] 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi yang terdistribusikan serta pelaksanaan pelayanan KB di Kabupaten Mojokerto yang terlayani sesuai SOP(Alokon)		16.990.6 40.000,0 0		6.406.967.0 00,00	26,93	1.504.55 0.000,00	0,00	262815000	0,00	644524000	0,00	479739000	26.92 9,00	93883600	26.92 9,00	1.480.96 1.600,00		7.887.928.6 00,00		46,43	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya(Laporan)					2,00	45.000.0 00,00	0,10	2.700.000,0 0	0,90	6.750.000,0 0	0,00	8.100.000,0 0	1,00	8.100.000,0 0	2,00	25.650.0 00,00					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)(Orang)					19,00	1.437.05 0.000,00	3,00	260.115.00 0,00	9,00	626.694.00 0,00	4,00	461.739.00 0,00	3,00	84.383.600, 00	19,00	1.432.93 1.600,00					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya(Laporan)					2,00	22.500.0 00,00	0,50	0,00	0,50	11.080.000, 00	0,00	9.900.000,0 0	1,00	1.400.000,0 0	2,00	22.380.0 00,00					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
3		[KEGIATAN] 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang mensosialisasikan program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana)(PPKBD dan Sub PPKBD)		5.563.36 0.000,00		1.884.471.5 00,00	1,83	602.750. 000,00	0,00	7996000	0,00	176492500	0,00	269717000	1.829, 00	126790500	1.829, 00	580.996. 000,00		2.465.467.5 00,00		44,32	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan

4		[SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.04.0002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB(Dokumen)					1,00	3.750.00 0,00	0,00	0,00	1,00	3.711.000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3.711.00 0,00					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)(Kampung)					177,00	599.000. 000,00	2,00	7.996.000,0 0	51,00	172.781.50 0,00	0,00	269.717.00 0,00	124,0 0	126.790.500 ,00	177,0 0	577.285. 000,00					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana		Prosentase Keluarga yang ikut kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(%)					72,50															Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan	
2		[PROGRAM] 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Prosentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif(%)		13.492.6 00.000,0 0	15.166.134. 924,00	97,91	5.841.06 0.750,00	0,00	26.609.400, 00	0,00	1.651.218.5 00,00	0,00	1.664.972.5 00,00	99,12	248501232 4	99,12	5.827.81 2.724,00		20.993.947. 648,00		155,60	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan	
3		[KEGIATAN] 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK- R yang Mendapat Pembinaan(Kelompok)		12.492.6 00.000,0 0	9.409.274.4 24,00	934,00	410.460. 750,00	0,00	26609400	0,00	22038500	0,00	35792500	934,0 0	312772324	934,0 0	397.212. 724,00		9.806.487.1 48,00		78,50	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan	
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.04.2.01.0016 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)(Laporan/Doku men)				1,00	48.000.0 00,00	0,00	0,00	1,00	11.980.000, 00	0,00	20.000.000, 00	0,00	9.040.000,0 0	1,00	41.020.0 00,00					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan	

4		[SUB KEGIATAN] 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia(Unit)				20,00	300.000. 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	297.920.000 ,00	32,00	297.920. 000,00						Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.04.2.01.0028 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk(Kelompok)				46,00	62.460.7 50,00	15,00	26.609.400, 00	31,00	10.058.500, 00	0,00	15.792.500, 00	0,00	5.812.324,0 0	46,00	58.272.7 24,00						Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
3		[KEGIATAN] 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK- R yang Mendapat Pembinaan(Kelompok)		1.000.00 0.000,00	5.756.860.5 00,00	934,00	5.430.60 0.000,00	0,00	0	0,00	162918000 0	0,00	162918000 0	934,0 0	217224000 0	934,0 0	5.430.60 0.000,00		11.187.460. 500,00		1.118,75	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan	
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)(Lapora n)				1,00	2.586.00 0.000,00	0,00	0,00	0,00	775.800.00 0,00	0,00	775.800.00 0,00	1,00	1.034.400.0 00,00	1,00	2.586.00 0.000,00						Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan

4		[SUB KEGIATAN] 2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan(Lapora n)				1,00	2.844.60 0.000,00	0,00	0,00	0,00	853.380.00 0,00	0,00	853.380.00 0,00	1,00	1.137.840.0 00,00	1,00	2.844.60 0.000,00						Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaa n Perempuan
	[Target Capaian Sub Kegiatan]																100.0 0 %							
		Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4																			

				sesuai denga n kinerj anya																						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]																							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel 2.1
(Tabel T-C. 29 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Mojokerto

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			</							

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	86 %	85 %	85 %	85 %	100 %	85 %	255 %	264 %
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangan	36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	100 %	36 Orang/bulan	108 Orang/bulan	300 %
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	86,15 %	86,15	86,15 %	86,15 %	100 %	86,15 %	258,45%	300 %
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Adribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai DP2KBP2 yang mendapatkan pakaian dinas	-	-	-	-	-	-	-	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 %	90 %	90 %	90 %	100 %	90 %	270 %	300 %
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14 Paket	14 Paket	14 Paket	100 %	14 Paket	42 Paket	300 %
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman yang Disediakan	168 Paket	168 Paket	168 Paket	168 Paket	100 %	168 Paket	504 Paket	300 %

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Pengadaan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100 %	4 Paket	12 Paket	300 %
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100 %	6 Dokumen	18 Dokumen	300 %
				Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100 %	4 Paket	12 Paket	300 %
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan	36 Laporan	300 %
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144 Laporan	119 Laporan	119 Laporan	119 Laporan	100 %	119 Laporan	357 Laporan	300 %
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	90 %	90 %	90 %	90 %	100 %	90 %	270 %	300 %
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan	36 Laporan	300 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Daya Air dan Listrik yang Disediakan								
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Selama 12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan	36 Laporan	300 %
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	270 %	300 %
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	182 Unit	182 Unit	182 Unit	100 %	182 Unit	546 unit	300 %
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Gedung	3 Gedung	3 Gedung	100 %	3 Gedung	9 Gedung	300 %
				Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit	21 Unit	21 Unit	100 %	21 Unit	63 Unit	300 %

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Prosentase kelembagaan daerah yang responsif gender	66,67%	73,68 %	73,68 %	73,68 %	100 %	73,68 %	221 %	300 %
				Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota	Jumlah OPD yang melaksanakan anggaran responsif gender	86 OPD	54 OPD	54 OPD	54 OPD	100 %	86 OPD	194 OPD	359 %
				Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	57 Dok	57 Dok	57 Dok	57 Dok	100 %	57 Dok	171 Dok	300 %
				Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	36 PD	36 PD	36 PD	36 PD	100 %	36 PD	108 PD	300 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi wanita dan lembaga penyedia layanan yang mendapat pembinaan	90 Orang	6 gugus tugas PPA desa	6 gugus tugas PPA desa	100 %	90 Orang	-	-
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	57 Lembaga	57 Lembaga	57 Lembaga	100 %	57 Lembaga	171 Lembaga	300 %
				Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100 %	1 Dok	3 Dok	300 %
				Program Perlindungan Perempuan	Prosentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	300 %	3 %
				Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Jumlah lintas sektor yang berperan aktif dalam	65 Orang	14 Mitra kerja/	14 Mitra kerja/	100 %	65 Orang	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	pencegahan kekerasan terhadap perempuan atau TPPO		Jejaring	Jejaring	Jejaring				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Ko	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100 %	1 Dok	3 Dok	300 %
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Mitra Kerja / Jejaring yang Dapat Bersinergi dengan P2TP2A	15 mitra kerja / jejaring	70 Org	70 Org	70 Org	100 %	14 mitra kerja / jejaring	-	-
	Penyedia Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	50 Org	50 Org	50 Org	50 Org	100 %	150 Org	-	300 %

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	100 %	3 Layanan	9 Layanan	300 %
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebutuhan rumah aman dan jumlah petugas yang tercukupi dan cakap dalam pendampingan	43 Orang	43 Org	43 Org	43 Org	100 %	43 Orang	129 Org	300 %
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	36 Orang	36 Orang	36 Orang	36 Orang	100 %	36 Orang	108 Orang	300 %
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Prosentase kepala desa yang mendapatkan pemahaman	49,34%	16,45 %	16,45 %	16,45 %	100 %	38,89%	71,79 %	1,45 %

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					tentang kebijakan pelaksanaan PUG di desa								
				Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah	Jumlah kepala desa yang memahami kebijakan pelaksanaan PUG tingkat desa	72 orang	72 Org	72 Org	72 Org	100 %	72 Orang	216 Org	300 %
				Advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak kewenangan Kab/kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	57 Perangkat	57 Perangkat	57 Perangkat	57 Perangkat	100 %	57 Perangkat	171 Perangkat	300 %
				Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Prosentase OPD yang memiliki data terpilah gender dan anak	93,75%	89,58 %	89,58 %	89,58 %	100 %	91,67%	270 %	2,8 %
				Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyaji Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Profil Gender dan Anak yang Disusun	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	100 %	1 buku	3 Buku	300 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kab/kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100 %	1 Dok	3 Dok	300 %
				Program Pemenuhan Hak Anak	Prosentase kecamatan layak anak	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	300 %	300 %
					Prosentase desa kelurahan layak anak	72,37%	100 %	100 %	100 %	100 %	300 %	300 %
				Pelembagaan PHA dan Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan dan desa yang memahami PHA	136 Orang	80 Org	80 Org	100 %	136 Orang	296 Org	218 %
				Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kab/kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	27 Organisasi	27 Organisasi	27 Organisasi	100 %	27 Organisasi	81 Organisasi	300 %
				Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100 %	1 Dok	3 Dok	300 %

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				memenuhi hak anak kewenangan kab/kota	Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota								
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jejaring yang bersinergi dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten Mojokerto	175 orang	175 Org	175 Org	175 Org	100 %	175 Orang	525 Org	300 %
				Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	95 orang	95 Org	95 Org	95 Org	100 %	95 Orang	285 Org	300 %
				Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	3 Dokumen	300 %
				Program Perlindungan Khusus Anak	Prosentase korban anak dan ABH (anak yang berhadapan	41,82%	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	300 %	300 %

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					dengan hukum) yang mendapatkan layanan								
				Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lintas sektor dan remaja yang berperan aktif dalam pencegahan terhadap anak atau TPPO	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	100 %	60 Orang	180 Orang	300 %
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Perangkat	15 Perangkat	15 Perangkat	15 Perangkat	100 %	15 Perangkat	45 Perangkat	300 %
				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jejaring dan petugas yang bersinergi dengan P2TP2A dan anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan	125 Orang	125 Orang	125 Orang	125 Orang	100 %	125 Orang	375 Org	300 %
				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	100 %	5 Orang	15 Orang	300%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota								
				Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kab/kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Layanan	10 Layanan	10 Layanan	10 Layanan	100 %	10 Layanan	30 Layanan	300 %
				Penguatan Jejaring antar Lembaga Peneyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	3 Dokumen	300 %
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kepala Desa yang Memahami Desa Layak Anak	108 Orang	108 Orang	108 Orang	108 Orang	100 %	108 Orang	324 Org	300 %
				Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	3 Dokumen	300 %

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				sarana dan prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kab/kota	Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota								
				Program Pengendalian Penduduk	Prosentase Data Program Bangga Kencana dan Data Keluarga yang dilaporkan	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	300 %	300 %
				Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Petugas KKBPK dan Lintas Sektor yang Melaksanakan Koordinasi Program KKBPK	100 Org	100 Org	100 Org	100 Org	100 %	100 orang	300 Org	300 %
				Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Petugas KKBPK dan Lintas Sektor yang Melaksanakan Koordinasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	3 Laporan	300 %

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkiraan Pengendalian Penduduk Tahun 2021 yang Dipetakan	1.169.760 jiwa	1.169.760 jiwa	1.170.748 jiwa	1.170.748 jiwa	100 %	1.169.760 jiwa	3.510.268 Jiwa	300 %
				Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	38 Unit	38 Unit	38 Unit	38 Unit	100 %	38 Unit	114 Unit	300 %
				Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	6 Dokumen	300 %
				Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	3 Laporan	300 %
				Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	3 Laporan	300 %

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Prosentase PUS yang mendapat pelayanan Keluarga Berencana	80,8%	80,8%	80,8%	80,8%	100 %	80,8%	242,40 %	300 %
				Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah media komunikasi program KKBPK	2 Jenis media KIE	2 Jenis media KIE	2 Jenis media KIE	2 Jenis media KIE	100 %	2 Jenis media KIE	6 Jenis media KIE	300 %
				Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	1 Organisasi	1 Organisasi	1 Organisasi	1 Organisasi	100 %	1 Organisasi	3 Organisasi	300 %
				Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	6 Dokumen	300 %
				Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100 %	4 Laporan	12 Laporan	300 %

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (MiniloK)	Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)								
				Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK (DAK Non Fisik)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	18 Balai Penyuluh	18 Balai Penyuluh	18 Balai Penyuluh	18 Balai Penyuluh	100 %	18 balai penyuluh	54 Balai penyuluh	300 %
				Pengendalian Program KKBPK (DAK Non Fisik)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100 %	2 Laporan	6 Laporan	300 %
				Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah PLKB yang Mendapat Pembinaan Program KKBPK	60 Orang	60 Org	60 Org	60 Org	100 %	60 Orang	180 Org	300 %
				Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga,	1 Organisasi	1 Organisasi	1 Organisasi	1 Organisasi	100 %	1 Organisasi	3 Organisasi	300 %

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB								
				Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100 %	3 Unit	9 Unit	300%
				Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana / Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB / PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	3 Laporan	300%
				Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (DAK NON FISIK)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1828 Orang	1828 Orang	1828 Orang	1828 Orang	100 %	1828 Orang	5484 Orang	300 %
.				Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan	Jumlah pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi yang terdistribusikan serta pelaksanaan pelayanan KB di	46 Faskes	46 Faskes	46 Faskes	46 Faskes	100 %	46 Faskes	138 Faskes	300 %

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Mojokerto yang terlayani sesuai SOP								
				Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jaringannya (DAK NON FISIK)	Jumlah pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi yang terdistribusikan serta pelaksanaan pelayanan KB di Kabupaten Mojokerto yang terlayani sesuai SOP	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100 %	2 Laporan	6 Laporan	300 %
				Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (APBD DAN DAK NON FISIK BOKB)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2229 Orang	2229 Orang	2229 Orang	2229 Orang	100 %	2229 Orang	6687 Orang	300 %
				Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB (DAK FISIK)	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100 %	6 Unit	18 Unit	300 %
				Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	Jumlah Pelayanan KB yang Dapat Ditingkatkan Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	43 Faskes	42 Faskes	42 Faskes	42 Faskes	100 %	43 Faskes	127 faskes	295 %

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	3 Laporan	100 %
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang Mensosialisasikan Program KKBPK	1.828 PPKBD dan Sub PPKBD	1.828 PPKBD dan Sub PPKBD	1.828 PPKBD dan Sub PPKBD	1.828 PPKBD dan Sub PPKBD	100 %	1.828 PPKBD dan Sub PPKBD	5.484 kader PPKBD dan Sub PPKBD	300 %
				Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	3 Dokumen	380 %
				Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB (DAK NON FISIK)	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	38 Kampung KB	38 Kampung KB	38 Kampung KB	38 Kampung KB	100 %	38 Kampung KB	114 Kampung KB	300 %

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Prosentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif	96,96%	96,96%	96,96%	96,96%	100 %	96,96%	291 %	300 %
				Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R yang Mendapat Pembinaan	1.066 Kelompok	1.066 Kelompok	1.066 Kelompok	1.066 Kelompok	100 %	1.066 Kelompok	3.198 kelompok	300 %
				Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	3 Kelompok	3 Kelompok	3 Kelompok	3 Kelompok	100 %	3 Kelompok	9 Kelompok	300 %
				Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan	30 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit	100 %	30 Unit	90 Unit	300 %

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)								
				Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	3 Laporan	300 %
				Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	100 %	20 Orang	600 org	300 %
				Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan (BKB, BKR,	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R	2586 Orang	2586 Orang	2586 Orang	2586 Orang	100 %	2586 Orang	7758 Orang	300 %

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				BKL, PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)								
				Penyerasian Kebijakan Dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	100 %	18 Dokumen	54 Dokumen	300 %

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Mojokerto, DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto dengan kriteria Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk menganalisis tingkat keberhasilan dan kegagalan dapat dilihat sejauh mana strategi pencapaian sasaran berupa kebijakan yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program-program yang menjadi tolok ukur pada Standar Pelayanan Minimal bidang pelayanan terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, bidang Keluarga Berencana

Capaian Indikator Kinerja (Renstra DP2KBP2 2016-2021)

Pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Pengumpulan data kinerja dilakukan untuk memperoleh data kinerja yang akurat, lengkap dan tepat waktu sehingga bermanfaat bagi pengambilan keputusan dan perbaikan dengan tidak meninggalkan prinsip efisiensi, efektifitas dan penghematan biaya. Analisis tentang pencapaian kinerja secara keseluruhan dimaksudkan sebagai bahan laporan tentang keberhasilan ataupun kegagalan kepada atasan dan pihak – pihak yang berkepentingan.

Capaian kinerja yang dicapai di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto dilihat dari bagaimana Organisasi memiliki target tinggi yang ingin dicapai.

Capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat daerah periode 2025 – 2029 untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan perangkat daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang diratifikasi oleh pemerintah di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto adalah :

Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja organisasi pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Analisis pencapaian kinerja pelayanan DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

(Tabel T-C. 30 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto

NO	IINDIKATOR	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra PD					Realisasi Capaian					Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7		8			9		10	11	13
1.	Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	-	-	APE Madya	APE Madya	APE Madya	APE Nindya	APE Nindya	APE Madya	APE Madya	APE Nindya	APE Nindya	-	APE Mentor	Di dapat dari 7 komponen kunci : 1. Komitmen 2. Kebijakan 3. Kelembagaan 4. SDM dan Anggaran 5. Alat Analisis Gender 6. Data Gender 7. Partisipasi Masyarakat
2.	Kabupaten Layak Anak (KLA)	-	-	KLA Madya	KLA Nindya	KLA Madya	KLA Nindya	KLA Nindya	KLA Madya	KLA Madya	KLA Madya	KLA Madya	-		Berdasarkan 5 Klaster : 1. Hak Sipil dan Kebebasan 2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif 3. Kesehatan dasar dan Kesejahteraan 4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Ruang dan Kegiatan Budaya 5. Perlindungan Khusus

3.	Prevalensi Peserta KB Aktif	-	-	80,62%	80,56%	80,73%	80,30%	80,50%	80,67%	80,73%	80,23%	80,06%	-	80,60%	Data di dapat berdasarkan jumlah PUS di banding jumlah peserta KB aktif (yang ikut IUD, MOW, MOP, Kondom, Implant, Suntuk dan Pil)
4.	Persentase Keluarga yang Ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	72,94%	72,96%	71,11%	72,50%	73,50%	72,96%	71,11%	72,00%	73,30%	-	73,00%	Data di dapat berdasarkan jumlah keluarga yang ikut kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga di banding Jumlah sasaran
5.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	83,28 (A)	83,78 (A)	84,28 (A)	84,50 (A)	84,65 (A)	83,19 (A)	83,87 (A)	84,42 (A)	84,55 (A)	-	84,80 (A)	Nilai Evaluasi SAKIP DP2KBP2 yang di keluarkan oleh Inpektorat
6.	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	-	-	78,59%	86,00%	87,00%	96,50%	96,55%	78,59%	84,67%	95,83%	96,22%	-	96,60%	Data di dapat dari Jumlah realisasi anggaran perangka daerah di banding jumlah anggaran perangkat daerah
7.	Indeks Profesionalitas ASN	-	-	65,39 (Sedang)	65,39 (Sedang)	58,43 (Sedang)	86,20 (Tinggi)	85,50 (Tinggi)	72,27 (Sedang)	58,43 (Sedang)	86,15 (Tinggi)	85,46 (Tinggi)	-	86,30 (Tinggi)	Indeks profesionalitas ASN didapat dari kualitas ASN Berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan disiplin pegawai asn dalam melakukan tugas jabatannya
8.	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	-	-	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	-	1 Inovasi	-

Analisa Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Capaian	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian	Kategori	Sumber data
1	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,18 %	-	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana	Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	APE Nindya	APE Nindya	100 %	Sangat Tinggi	Bidang PPPUG
						Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA)	KLA Nindya	KLA Madya	90 %	Tinggi	Bidang PA
						Prevalensi KB Aktif	80,30 %	80,06 %	99,70 %	Sangat Tinggi	Bidang KB
						Persentase Keluarga yang Ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	72,50 %	73,30 %	101,10 %	Sangat Tinggi	Bidang PPKS
2.					Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,50 (A)	84,55 (A)	100,09 %	Sangat Tinggi	Sekretariat
						Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,5%	96,22 %	100,18 %	Sangat Tinggi	Sekretariat
						Indeks Profesionalitas ASN	86,20 (Tinggi)	85,46 (Tinggi)	99,14 %	Sangat Tinggi	Sekretariat
3.					Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi	1 Inovasi	100 %	Sangat Tinggi	Bidang PPPUG

Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Sasaran strategis 1 : “Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak Serta Keluarga Berencana” dengan indikator :

1. Evaluasi Anugerah Ekapraya (APE), tahun 2024 terealisasi dengan Nilai APE Ninya dan tingkat capaian sebesar 100% dengan predikat **Sangat Berhasil**.

Perhitungan Evaluasi Anugerah Ekapraya (APE) dengan nilai APE Nindya diperoleh dari 3 komponen kunci :

a) **Pelebagaan PUG** terdiri dari :

- a. Regulasi/Kebijakan tentang Penyelenggaraan PUG, di buktikan dengan SK Fokal Point, **Perda Nomor 1 Tahun 2021** tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), **Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020** tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.
- b. Kebijakan, di buktikan dengan RPJMD, Renstra, Renja, KUA – PPAS, RKA Perangkat Daerah.
- c. Kelembagaan, telah terbentuk **UPTD PPA** dengan Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2023
- d. Kelompok Pokja PUG, **Tim driver PUG, Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG**
- e. **Sumber Daya Manusia** yang **terlatih PUG** (SDM Perencana, SDM Teknis, SDM Pemantau, Evaluasi dan Pelaporan, SDM APIP, SDM Bidang Hukum, SDM Aparat Penegak Hukum dan **Internalisasi PUG** serta Fasilitas yang memadai
- f. Sistem Data Terpilah Gender data diperoleh dari tiap Perangkat Daerah berupa **Satu Data Palapa** (Data Statistik yang terpilah dan Profil Gender)

b) **Penyelenggaraan PUG** terdiri dari :

- a. Perencanaan dibuktikan dengan dokumen ARG (penyusunan GAP, GBS, TOR) tiap Perangkat Daerah, adanya modul dan panduan untuk menyusun dokumen ARG, Dokumen ARG 25 % dari anggaran tahun n – 1
- b. Penganggaran PUG dibuktikan dengan issue Gender dalam penganggaran PUG dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial

(Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim), Ekonomi dan Bidang Lainnya mulai pada RPJMD, Renstra, Renja, KUA – PPAS, RKA Perangkat Daerah.

- c. Pelaksanaan dibuktikan dengan Partisipasi Masyarakat, Dunia Usaha, Media dan Akademisi Jejaring sebagai kontrol, pengawas, mitra kerja pelayanan pelaksanaan PUG (Puspa, CSR, LSM, Akademisi) di libatkan dalam pelaksanaan Pengarus utamaan Gender serta ketersediaan sarana dan prasarana yang responsive Gender dan juga pelaksanaan (advokasi dan sosialisasi, bimtek, pembinaan, pendampingan, pengawasan dan Evaluasi) Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)
- d. Pemantauan, melibatkan seluruh Perangkat Daerah dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat yang Responsif Gender
- e. Evaluasi dilakukan oleh Kepala Daerah dalam bentuk Evaluasi Dokumen ARG Perangkat Daerah, Desk PPRG.
- f. Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Kab. Mojokerto berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLLHP) terhadap Dokumen Anggaran Responsif Gender.
- g. Pelaporan berupa Lakip, LKPJ, LPPD dan Laporan Pelaksanaan PUG yang disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur melalui DP3AK Prov. Jatim.

c) Inovasi PUG meliputi:

Berupa duplikasi/replikasi kearifan Lokal atau Modifikasi merupakan bentuk kebaruan (ide/gagasan baru) terintegrasi dengan layanan sistem lain, berkelanjutan, yang dicapai dengan cara kreatif, memiliki dampak dan direplikasi sebagai best practice. (Inovasi Kasat Mata, Inovasi labujari, Inovasi Darisasoo, Inovasi Mensasoo.

APE MENURUT KATEGORI NILAI DARI TAHUN 2020 sd 2024:

TAHUN	KATEGORI	NILAI	KETERANGAN
2020	MADYA	601 - 700	Monev
2021	MADYA	601 - 700	Tidak ada monev
2022	MADYA	601 - 700	Tidak ada monev
2023	NINDYA	701 - 800	Monev
2024	NINDYA	701 - 800	Tidak ada monev

Sumber data : Bidang PPPUG

Adapun monitoring dan evaluasi implementasi PUG yang di lakukan melalui pemberian penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) terdiri atas prasarat aspek organisasi :

1. Komitmen politik dan kepemimpinan kelembagaan;
2. Kebijakan responsif gender;
3. Kelembagaan;
4. Sumber daya manusia dan anggaran;

Sementara itu, prasarat aspek non organisasi meliputi :

5. Sistem informasi dan data terpilah/gender;
6. Alat analisis gender;
7. Partisipasi masyarakat.

Walaupun sudah memenuhi target kinerja, namun terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

- ✓ Terdapat perangkat daerah yang belum mengumpulkan dokumen ARG (Anggaran Responsif Gender);
- ✓ Terdapat perangkat daerah yang belum paham membuat dokumen ARG (Anggaran Responsif Gender); dan
- ✓ Pengumpulan data tidak tepat waktu; dan
- ✓ Belum optimalnya evaluasi kinerja perangkat daerah.

Rencana tindaklanjut :

- ✓ Dilakukan evaluasi kepada perangkat daerah pada Dokumen Anggaran Responsif Gender (ARG);
- ✓ Mengintensifkan koordinasi dengan perangkat daerah

- terkait pengumpulan Dokumen Anggaran Responsif Gender (ARG);
2. Kabupaten Layak Anak (KLA), tahun 2024 terealisasi dengan Nilai APE Madya dan tingkat capaian sebesar 90% dengan predikat **Tinggi**.

Perhitungan Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan nilai KLA Madya diperoleh berdasarkan 5 klaster :

1. Hak Sipil dan Kebebasan, di buktikan dengan pembuatan akte seluruh anak di Kabupaten Mojokerto (dispenduk capil), Forum anak desa, kecamatan, kabupaten (DP2KBP2), Tersedianya pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A), Pengawasan penggunaan internet bagi anak (pengawasan tim cyber dari Polres/kominfo), KIE bagi anak disabilitas (Dinsos), penyediaan KIA (dispenduk capil).
2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, dibuktikan dengan pengasuhan alternatif (lingkungan keluarga dan yayasan untuk anak terlantar), Pemenuhan tumbuh kembang ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum), Pelatihan pola asuh anak, dukungan akreditasi LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Villa durian do'a, Pendidikan pra nikah dilakukan Kemenak dan DP2KBP2.
3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, adanya puskesmas ramah anak, ruang laktasi di semua fasilitas umum, fasilitasi sarpras posyandu, teredianya air bersih, ruang terbuka hijau, Perventif AKI dan Anak (Dinas Kesehatan)
4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Ruang dan Kegiatan Budaya, di buktikan dengan wajib belajar 9 tahun, Pendidikan inklusi, Pusat kreatifitas anak, Sarpras ZOSS (Zona Selamat Sekolah), Mewujudkan Sekolah Ramah Anak (SK Sekolah Ramah Anak), Beasiswa, Memfasilitasi SKB, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah tanpa kekerasan
5. Perlindungan Khusus, adanya fasilitasi P2TP2A, program pencegahan tindak kekerasan yang di lakukan oleh DP2KBP2 dan Dinas Sosial,

Perlindungan dan mitigasi bencana bagi anak (Dinsos dan BPBD), akses kartu penyandang disabilitas (dari dinsos).

KLA MENURUT KATEGORI NILAI DARI TAHUN 2020 sd 2024 :

TAHUN	KATEGORI	NILAI	KETERANGAN
2020	MADYA	601 - 700	Tidak ada Monev
2021	MADYA	601 – 700	Monev
2022	MADYA	601 – 700	Monev
2023	MADYA	601 – 700	Monev
2024	MADYA	601 – 700	Tidak ada monev

Sumber data : Bidang Perlindungan Anak

Adapun penilaian yang di lakukan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Layak Anak adalah pemenuhan 31 hak anak yang menjadi tanggung jawab bersama seluruh Perangkat daerah Terkait, misal :

1. Dispenduk capil berkaitan dengan hak sipil dan kebebasan diantaranya identitas anak;
2. Dinas Sosial dan DP2KBP2 berkaitan dengan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif (anak – anak terlantar);
3. Dinas Kesehatan berkaitan dengan Kesehatan dasar dan Kesejahteraan terkait pencegahan stunting, 1000 hari Pertama Kehidupan, tumbuh kembang anak dll;
4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Ruang dan Kegiatan Budaya berkaitan dengan Dinas Pendidikan;
5. Dinas Sosial dan BPBD berkaitan dengan Perlindungan khusus diantaranya anak disabilitas, Anak Berhadapan Dengan Hukum dan anak korban bencana alam.

Walaupun sudah kategori tinggi, namun terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

- ✓ Tidak ada penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA) di Tahun 2024 ;
- ✓ Penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA) di laksanakan Tahun 2025; dan

- ✓ Pengumpulan data tidak tepat waktu; dan
- ✓ Belum optimalnya evaluasi kinerja perangkat daerah.

Rencana tindaklanjut :

- ✓ Dilakukan evaluasi kepada perangkat daerah terkait data yang di perlukan;
- ✓ Mengintensifkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait pengumpulan data yang di perlukan.

3. Prevalensi KB Aktif, tahun 2024 terealisasi sebesar 80,06 % dan tingkat capaian sebesar 99,70% dengan predikat **Sangat Tinggi**.
Perhitungan Prevalensi KB Aktif sebesar 80,06 % diperoleh dari :

$$\frac{\text{Jumlah Peserta Aktif (PA)}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)}} \times 100\%$$

**PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF
DI KABUPATEN MOJOKERTO BULAN DESEMBER 2024**

NO	KECAMATAN	PPM	PUS	ALAT KONTRASEPSI							JUMLAH	% THDP PPM	MKJP	%MKJP	PREV.
		2024		IUD	MOW	MOP	KD	IMP	STK	PIL					
1	JATIREJO	4.232	7.233	782	616	2	165	649	2.947	762	5.923	139,96	2.049	34,59	81,89
2	GONDANG	5.050	10.137	1.734	735	30	8	1.951	2.796	956	8.210	162,57	4.450	54,20	80,99
3	PACET	6.924	13.343	2.066	653	12	14	2.241	4.528	1.277	10.791	155,85	4.972	46,08	80,87
4	TRAJAS	3.191	6.154	429	407	3	34	667	2.751	602	4.893	153,34	1.506	30,78	79,51
5	NGORO	9.451	17.074	1.528	1.121	11	363	1.352	6.545	2.868	13.788	145,89	4.012	29,10	80,75
6	PUNGGING	8.496	14.112	1.119	398	8	132	540	7.620	1.081	10.898	128,27	2.065	18,95	77,23
7	KUTOREJO	6.769	13.921	528	382	5	205	1.121	5.422	4.090	11.753	173,63	2.036	17,32	84,43
8	MOJOSARI	8.583	12.696	2.753	1.150	15	471	1.289	3.157	1.251	10.086	117,51	5.207	51,63	79,44
9	DLANGGU	6.657	12.491	1.590	1.063	48	64	1.576	4.712	1.015	10.068	151,24	4.277	42,48	80,60
10	BANGSAL	5.572	9.717	642	441	6	481	735	4.392	1.171	7.868	141,21	1.824	23,18	80,97
11	PURI	8.452	15.800	1.308	740	17	761	2.012	5.128	2.790	12.756	150,92	4.077	31,96	80,73
12	TROWULAN	8.691	12.717	600	580	11	89	744	5.324	1.583	8.931	102,76	1.935	21,67	70,23
13	SOOKO	8.362	14.806	1.981	846	4	378	900	6.445	1.321	11.875	142,01	3.731	31,42	80,20
14	GEDEG	8.551	16.670	1.953	926	22	638	1.781	5.777	2.424	13.581	158,09	4.682	34,64	81,09
15	KEMLAGI	6.358	11.703	1.021	910	60	242	1.383	5.024	849	9.489	149,25	3.374	35,56	81,08
16	JETIS	10.447	19.340	1.049	660	61	623	1.121	9.404	2.321	15.239	145,87	2.891	18,97	78,80
17	DAWARBLANDONG	5.296	8.880	347	361	8	113	829	4.717	1.110	7.485	141,33	1.545	20,64	84,29
18	MOJOANYAR	4.629	8.890	962	490	10	119	820	3.635	1.075	7.111	153,62	2.282	32,09	79,99
	KABUPATEN	125.711	225.684	22.392	12.479	333	4.897	21.711	90.324	28.546	180.682	143,73	56.915	31,50	80,06

Sumber Data : Aplikasi SIGA (Sistem Informasi Keluarga)

Pencapaian Peserta KB Aktif per Mix Kontrasepsi sebagai berikut :

No.	Jenis Kontrasepsi	Pencapaian Bulan Desember 2024
1	IUD	22.392
2	MOW	12.479
3	MOP	333
4	Kondom	4.897
5	Implant	21.711
6	Suntik	90.324
7	Pil	28.546
	TOTAL	180.682

Sumber Data : Aplikasi SIGA (Sistem Informasi Keluarga)

Perbandingan Prevalensi KB Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 s/d 2024

No.	Tahun	Jumlah PUS	Jumlah Peserta KB Aktif	Prevalensi (%)
1.	2020	245.061	197.565	80,62
2.	2021	247.373	199.545	80,67
3.	2022	227.174	183.388	80,73
4.	2023	230.204	184.695	80,23
5.	2024	225.684	180.682	80,06

Sumber Data : Aplikasi SIGA (Sistem Informasi Keluarga)

Dari data diatas, maka prevalensi per tahun stabil 80 %. Hal ini diharapkan dalam kurun waktu tersebut mampu menurunkan angka TFR dari Kabupaten Mojokerto. Dengan melihat indikasi kestabilan prevalensi tersebut maka KIE dan pembinaan kepada akseptor perlu ditingkatkan agar angka DO dapat ditekan dan melestarikan akseptor KB.

Walaupun sudah kategori sangat tinggi, namun terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

- ✓ Menurunnya unmet need (pasangan usia subur yang tidak ingin punya anak lagi atau yang ingin menjarangkan kelahiran, tetapi tidak menggunakan kontrasepsi) Tahun 2024 ;
- ✓ Kurang nya Kepesertaan KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang;
- ✓ Kurangkanya kepesertaan KB Aktif;
- ✓ Pengumpulan data tidak tepat waktu; dan
- ✓ Belum optimalnya evaluasi kinerja kepada penyuluh KB serta kader PPKBD dan Sub PPKBD.

Rencana tindak lanjut :

- ✓ Dilakukan Sosialisasi KB dengan sasaran Pasangan Usia Subur;
- ✓ Dilakukan pelayanan KB Kepada PUS anmet need dan sosialisasi KB MKJP;
- ✓ Dilakukan pelatihan SDM bagi kader PPKBD dan Sub PPKBD;
- ✓ Dilakukan pelatihan SDM bagi petugas medis; dan
- ✓ Pendistribusian alokasi ke faskes – faskes tepat waktu.

4. Persentase Keluarga yang Ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terealisasi sebesar 73,30 % dan tingkat capaian sebesar 101,10 % dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Perhitungan Persentase Keluarga yang Ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebesar 73,30 % di peroleh dari :

$$\frac{\text{Jumlah Keluarga yang ikut kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga}}{\text{Jumlah sasaran kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga}} \times 100\%$$

**PROSENTASE KELOMPOK KETAHANAN KELUARGA
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA YANG AKTIF
DI KABUPATEN MOJOKERTO**

No.	KECAMATAN	JUMLAH SASARAN					REKAP JUMLAH SASARAN	JUMLAH YANG IKUT KEGIATAN					REKAP JUMLAH YANG IKUT KEGIATAN	PROSENTASE
		BKB	BKR	BKL	PIK R	UPPKA		BKB	BKR	BKL	PIK R	UPPKA		
	JATIREJO	3.342	329	539	125	20	4.355	2.562	236	437	234	20	3.489	80,11
	GONDANG	3.176	417	396	275	20	4.284	2.430	385	344	50	20	3.229	75,37
	PACET	4.442	5.884	487	125	34	10.972	3.389	4.698	473	161	34	8.755	79,79
	TRAWAS	1.935	282	159	150	37	2.563	1.500	125	79	110	34	1.848	72,10
	NGORO	6.074	6.338	178	125	10	12.725	4.676	4.322	164	105	10	9.277	72,90
	PUNGGING	4.928	1.852	1.073	125	55	8.033	3.780	520	491	39	51	4.881	60,76
	KUTOREJO	4.511	2.441	821	125	55	7.953	3.478	843	573	91	52	5.037	63,33
	MOJOSARI	4.237	1.322	1.121	150	25	6.855	3.257	779	561	91	23	4.711	68,72
	DLANGGU	4.035	1.521	570	100	40	6.266	3.097	1.009	413	152	40	4.711	75,18
	BANGSAL	3.339	318	370	150	21	4.198	2.535	247	267	120	21	3.190	75,99
	PURI	5.165	667	540	150	17	6.539	3.956	535	456	75	17	5.039	77,06
	TROWULAN	5.098	651	570	325	14	6.658	3.911	422	543	260	14	5.150	77,35
	SOOKO	5.225	370	615	125	22	6.357	3.983	322	509	104	19	4.937	77,66
	GEDEG	3.492	2.431	1.019	150	89	7.181	2.700	534	513	69	77	3.893	54,21
	KEMLAGI	4.171	108	152	150	21	4.602	3.199	91	110	69	21	3.490	75,84
	JETIS	5.209	129	67	100	19	5.524	4.026	126	55	80	14	4.301	77,86
	DAWARBLANDON G	3.353	646	807	500	385	5.691	2.573	585	791	700	380	5.029	88,37
	MOJOANYAR	3.721	395	435	175	55	4.781	2.855	324	361	130	49	3.719	77,79
	JUMLAH	75.453	26.101	9.919	3.125	939	115.537	57.906	16.103	7.140	2.640	896	84.686	73,30

Sumber Data : Aplikasi SIGA (Sistem Informasi Keluarga)

Jumlah keluarga yang ikut kelompok ketahanan dan kesejahteraan Keluarga di kabupaten Mojokerto Sebesar 84.686 Keluarga dapat di lihat dari data sebagai berikut :

No.	Kelompok	Juamlah Keluarga yang ikut kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Sasaran
1.	BKB	57.906	75.453
2.	BKR	16.103	26.101
3.	BKL	17.085	9.919
4.	PIK - R	2.625	3.125
5.	UPPKA	608	939
JUMLAH		81.353	115.537

Sumber Data : Aplikasi SIGA (Sistem Informasi Keluarga)

Walaupun sudah kategori sangat tinggi, namun terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

- ✓ Kurangnya kepesertaan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL UPPKA) Tahun 2024; dan
- ✓ Pengumpulan data tidak tepat waktu.

Rencana tindaklanjut :

- ✓ Dilakukan Sosialisasi pembentukan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL UPPKA);
- ✓ Dilakukan pelatihan SDM bagi kader BKB, BKR, BKL, UPPKA;

b. Sasaran strategis 2 : “Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel” dengan indikator :

1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah, dengan Nilai 84,55 (A) dan tingkat capaian sebesar 100,09% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Nilai Evaluasi SAKIP DP2KBP2 yang di keluarkan oleh Inpektorat

NILAI SAKIP DP2KBP2 DARI TAHUN 2021 sd 2024

TAHUN	NILAI	KETERANGAN
2021	83,19 (A)	Dari hasil evaluasi inspektorat 1. Komponen Perencanaan Kinerja 27,74 2. Pengukuran kinerja 20,00 3. Pelaporan Kinerja 12,58 4. Evaluasi Internal 16,81 5. Pencapaian Sasaran/kinerja 16,81
2022	83,87 (A)	Dari hasil evaluasi inspektorat 1. Komponen Perencanaan Kinerja 28,98 2. Pengukuran kinerja 25,99 3. Pelaporan Kinerja 12,05, 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 16,85
2023	84,42 (A)	Dari hasil evaluasi inspektorat 1. Komponen Perencanaan Kinerja 25,88 2. Pengukuran kinerja 25,35 3. Pelaporan Kinerja 12,44, 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 20,71
2024	84,55 (A)	Dari hasil evaluasi inspektorat 1. Komponen Perencanaan Kinerja 25,50, 2. Pengukuran kinerja 26,10 3. Pelaporan Kinerja 12,45, 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 20,50

Sumber data : Perencana/Inspektorat

2. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah, sebesar 96,22 % dan tingkat capaian sebesar 100,18 % dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Perhitungan Presentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah sebesar 96,22 % di lihat dari :

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Anggaran Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah Anggaran Perangkat Daerah}} \times 100\%$$

NILAI PROSENTASE RLA DP2KBP2 DARI TAHUN 2021 sd 2024

TAHUN	Prosentase (%)	KETERANGAN
2021	78,59	Anggaran sebelum Perubahan APBD : Rp. 18.704.695.874,00 Anggaran Setelah Perubahan PAPBD : <u>Rp. 18.136.274.266,00</u> Realisasi : Rp. 14.252.444.199,00 Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran : Rp. 3.883.830.029,00
2022	84,67	Anggaran sebelum Perubahan APBD : Rp. 18.760.987.400,00 Anggaran Setelah Perubahan PAPBD : <u>Rp. 20.080.700.356,00</u> Realisasi : Rp. 17.001.692.415,00 Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran : Rp. 3.079.007.941,00
2023	95,83	Anggaran sebelum Perubahan APBD : Rp. 20.282.709.400,00 Anggaran Setelah Perubahan PAPBD : <u>Rp. 20.975.893.333,00</u> Realisasi : Rp. 19.949.298.363,00 Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran : Rp. 1.026.594.970,00
2024	96,22	Anggaran sebelum Perubahan APBD : Rp. 20.140.239.912,00 Anggaran Setelah Perubahan PAPBD : <u>Rp. 20.431.065.412,00</u> Realisasi : Rp. 19.657.817.756,00 Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran : Rp. 773.247.656,00

Sumber data : Bagian Keuangan

PROYEKSI REALISASI ANGGARAN SAMPAI DENGAN DESEMBER 2024
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

NO	KODE SUB KEG	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	JUMLAH REALISASI SD DESEMBER	SISA S/D AKHIR DES	%
1.	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	22.278.800,00	21.525.942,00	752.858,00	96,62%
2.	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000,00	17.823.900,00	2.176.100,00	89,12%
3.	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	81.721.200,00	80.030.080,00	1.691.120,00	97,93%
4.	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	45.575.000,00	43.965.000,00	1.610.000,00	96,47%
5.	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/kegiatan pencegahan KTA	97.880.137,00	95.687.980,00	2.192.157,00	97,76%
6.	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	242.400.000,00	242.400.000,00	0,00	100%
7.	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1.207.600.000,00	1.206.883.828,00	716.172,00	99,94%
8.	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	140.000.000,00	111.170.000,00	28.830.000,00	79,41%
9.	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	892.800.000,00	859.759.000,00	33.041.000,00	96,30%
10.	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	270.000.000,00	269.096.000,00	904.000,00	99,67%
11.	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	100.000.000,00	96.551.000,00	3.449.000	96,55%
12.	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	250.000.000,00	222.005.000,00	27.995.000,00	88,80%
13.	2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	43.200.000,00	40.555.892,00	2.644.108,00	93,88%
14.	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	912.000.000,00	912.000.000,00	0,00	100%
15.	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1.241.400.000,00	1.237.200.332,00	4.199.668,00	99,66%

NO	KODE SUB KEG	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	JUMLAH REALISASI SD DESEMBER	SISA S/D AKHIR DES	%
16.	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana PKB/PLKB)	1.261.968.000,00	1.243.920.000,00	18.048.000,00	98,57%
17.	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	45.000.000,00	25.650.000,00	19.350.000,00	57,00%
18.	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.437.050.000,00	1.432.931.600,00	4.118.400,00	99,71 %
19.	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	22.500.000,00	22.380.000,00	120.000,00	99,47%
20.	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	3.750.000,00	3.711.000,00	39.000,00	98,96 %
21.	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	599.000.000,00	577.285.000,00	21.715.000,00	96,37 %
22.	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	48.000.000,00	41.020.000,00	6.980.000,00	85,46 %
23.	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	300.000.000,00	297.920.000,00	2.080.000,00	99,31 %
24.	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	62.460.750,00	58.272.724,00	4.188.026,00	93,29%
25.	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	2.586.000.000,00	2.586.000.000,00	0,00	100 %
26.	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	2.844.600.000,00	2.844.600.000,00	0,00	100 %
27.	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.000.000,00	6.999.700,00	300,00	100 %
28.	2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.200.000,00	4.199.900,00	100,00	100 %
29.	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.267.940.000,00	4.725.869.627,00	542.070.373,00	89,71 %
30.	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.599.400,00	8.599.000,00	400,00	100 %

NO	KODE SUB KEG	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	JUMLAH REALISASI SD DESEMBER	SISA S/D AKHIR DES	%
31.	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.000.000,00	11.760.000,00	240.000,00	98,00 %
32.	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.761.100,00	14.405.500,00	355.600,00	97,59 %
33.	2.14.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.180.800,00	7.148.000,00	32.800,00	99,54%
34.	2.14.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	33.721.375,00	27.839.800,00	5.881.575,00	82,56%
35.	2.14.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	7.000.000,00	6.986.500,00	13.500,00	99,81%
36.	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000,00	49.779.652,00	220.348,00	99,56%
37.	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.000.450,00	53.746.983,00	21.253.467,00	71,66%
38.	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	53.852.000,00	51.697.920,00	2.154.080,00	96,00%
39.	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	87.636.400,00	74.099.200,00	13.537.200,00	84,55%
40.	2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.990.000,00	4.555.700,00	434.300,00	91,30%
41.	2.14.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00	19.785.996,00	214.004,00	98,93%
JUMLAH			20.431.065.412,00	19.657.817.756,00	773.247.656,00	96,22%

Sumber Data : aplikasi e monev/ bagian keuangan

Persentasi realisasi anggaran perangkat daerah di dapat melalui aplikasi si monev yang di evaluasi setiap bulan

Anggaran sebelum Perubahan APBD	:	Rp. 20.140.239.912,00
Anggaran Setelah Perubahan PAPBD	:	<u>Rp. 20.431.065.412,00</u>
Realisasi	:	Rp. 19.657.817.756,00
Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran	:	<u>Rp. 773.247.656,00</u>

3. Indeks Profesionalitas ASN, dengan Nilai 85,46 (Tinggi) dan tingkat capaian sebesar 99,14 % dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Indeks profesionalitas ASN didapat dari kualitas ASN Berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan disiplin pegawai asn dalam melakukan tugas jabatannya.

NILAI IP ASN DP2KBP2 DARI TAHUN 2021 sd 2024 :

TAHUN	NILAI
2021	72,27 (Sedang)
2022	86,15 (Tinggi)
2023	86,15 (Tinggi)
2024	85,46 (Tinggi)

Sumber Data : Bagian Umum dan Kepegawaian

- c. Sasaran strategis 3 : “Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah” dengan Indikator, Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan dengan 1 inovasi dan tingkat capaian sebesar 100 % dengan predikat **Sangat Tinggi**.
- ✓ DP2KBP2 mempunyai inovasi berupa layanan online dengan nama RANGKUL KOREK PACARE (Ruang Pengaduan dan Konsultasi Korban Kekerasan pada Perempuan dan Anak secara online) Versi 2, pengaduan online selama 24 jam melalui hotline dengan nomor telpon 085860470510 serta link pengaduan <https://bit.ly/FormRANGKULKabMjk>.
 - ✓ Dalam keadaan emergency korban bisa melapor secara cepat dan bisa dilayani dengan cepat sesuai keinginan korban. Tanpa harus datang ke sekretariat P2TP2A terlebih dahulu.

2) Peran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Program Prioritas Pemerintah Daerah Tahun 2021 – 2024 :

1. Jumlah keluarga resiko stunting

Keluarga yang menjadi sasaran resiko stunting adalah

- a. Keluarga yang mempunyai balita/baduta yang tidak mempunyai jamban yang layak dan keluarga yang tidak mempunyai sumber air minum utama yang layak;
- b. Kategori keluarga beresiko stunting berdasarkan keluarga peringkat kesejahteraan 1, peringkat kesejahteraan 2, peringkat kesejahteraan 3, peringkat kesejahteraan 4, peringkat kesejahteraan >4 yang tidak mempunyai jamban yang layak dan tidak mempunyai sumber air minum utama yang layak;

- c. Pasangan Usia Subur (PUS) yang hamil dengan 4 Terlalu yaitu Terlalu Muda, Terlalu Tua, Terlalu Dekat, Terlalu Banyak.

Data Keluarga Resiko Stunting Tahun 2021 – 2024

No.	Tahun	Jumlah Keluarga Resiko Stunting	Jumlah Keluarga yang tidak mempunyai sumber air minum yang layak	Jumlah Keluarga yang tidak mempunyai jamban yang layak	Jumlah Keluarga dengan PUS Terlalu Muda	Jumlah Keluarga dengan PUS Terlalu Tua	Jumlah Keluarga dengan PUS Terlalu Dekat	Jumlah Keluarga dengan PUS Terlalu Banyak
1.	2021	133.672	3.687	12.596	946	102.713	3.065	29.774
2.	2022	14.437	316	4.499	768	9.166	1.799	7.702
3.	2023	27.061	2.269	18.012	516	45.622	906	26.999
4.	2024	20.080	1.690	7.834	483	44.293	971	23.649

Sumber Data : Pemutahiran Pendataan Keluarga PK 21 – PK 24

Dari data di atas di simpulkan bahwa dari tahun 2021 – 2024 mengalami penurunan yang signifikan, ini hasil dari pendampingan yang di lakukan oleh tim pendamping keluarga yang ada di tingkat Desa yang terdiri dari bidan, PKK, dan kader KB

2. Jumlah Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, PIK – R, UPPKA) atau Setara Kelompok kegiatan (Rumah Dataku, Kampung KB) dan Data Sumber Daya Manusia Lini Lapangan (PPKBD dan Sub PPKBD)

Program Pembangunan Keluarga di Dinas P2KBP2 kabupaten Mojokerto dari laporan yang masuk melalui wadah kelompok kegiatan di masyarakat adalah kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR), kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL), kelompok kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) yang berbasis masyarakat maupun sekolah. Sedangkan kegiatan pemebedayaan ekonomi keluarga melalui kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA). Untuk mengaktualisasi program – program pembangunan keluarga melalui kampung KB dan rumah dataku.

Data Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, PIK – R, UPPKA) atau Setara Kelompok kegiatan (Rumah Dataku, Kampung KB) dan Data Sumber Daya Manusia Lini Lapangan (PPKBD dan Sub PPKBD) Tahun 2021 s/d 2024

No.	Tahun	BKB	BKR	BKL	PIK-R	UPPKA	RUMAH DATAKU	KAMPUNG KB	PPKBD	SUB PPKBD
1.	2021	363	261	319	92	87	2	304	304	1.505
2.	2022	57	16	17	5	98	38	38	304	1.506
3.	2023	374	275	330	110	98	226	225	304	1.522
4.	2024	388	291	343	125	106	304	304	304	1.524

Sumber Data : Aplikasi SIGA (Sistem Informasi Keluarga)

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa progres dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, cuman di Tahun 2022 data menurun drastis dikarenakan data tersebut harus masuk aplikasi SIGA (Sistem Informasi Keluarga) sehingga di awal tahun itu belum keseluruhan data ketahanan keluarga masuk aplikasi SIGA (Sistem Informasi Keluarga).

3. Jumlah Peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) merupakan metode kontrasepsi dengan tingkat keefektifan yang tinggi dengan tingkat kegagalan yang rendah serta komplikasi dan efek samping yang lebih sedikit dibandingkan metode kontrasepsi yang lain. MKJP merupakan jenis kontrasepsi yang sekali pemakaiannya dapat bertahan selama 3 tahun sampai seumur hidup. Terdapat berbagai jenis MKJP seperti alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) atau IUD, medis operatif wanita (MOP), medis operasi pria (MOP) dan Implan.

**Data Peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Tahun 2021 sd 2024**

No.	Tahun	ALAT KONTRASEPSI			
		IUD	MOW	MOP	IMPLANT
1.	2021	26.534	14.028	407	25.172
2.	2022	22.056	12.373	364	20.973
3.	2023	22.654	12.599	361	22.462
4.	2024	22.392	12.479	333	21.711

Sumber Data : Aplikasi SIGA (Sistem Informasi Keluarga)

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa dari Tahun 2021 – 2024 mengalami penurunan dari semua metode MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) dikarenakan DO (Drop Out) (meninggal, menopause, pindah, ganti cara) lebih besar dari tambahan KB Aktif.

4. Median Usia Kawin Pertama (MUKP) seluruh wanita umur 25 – 49 Tahun

Median usia kawin pertama untuk perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia di mana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan.

**Data Median Usia Kawin Pertama (MUKP)
seluruh wanita umur 25 – 49 Tahun
Tahun 2021 sd 2024**

No.	Tahun	KELOMPOK UMUR (TAHUN)							
		< 20	%	21 - 26	%	26 - 30	%	< 30	%
1.	2021	1.637	17,76	4.044	43,88	1.856	20,14	1.678	18,21
2.	2022	1.046	12,81	4.166	50,94	1.531	18,72	1.434	17,53
3.	2023	1.055	13,68	3.597	46,63	1.863	24,02	1.209	15,67
4.	2024	815	11,21	3.495	48,07	1.797	24,71	1.164	16,01

Sumber Data : Aplikasi SIGA (Sistem Informasi Keluarga)

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa dari Tahun 2021 – 2024 mengalami penurunan itu berarti perkawinan usia di bawah 20 tahun baik/sedikit hal ini akibat sosialisasi yang dilaksanakan oleh DP2KBP2.

5. Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang melapor ke UPTD PPA/P2TP2A

UPTD PPA sebagai tempat layanan pengaduan masyarakat khususnya perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan dan menjadi urusan wajib bukan pelayanan dasar, namun Pemerintah Daerah harus menyediakan tempat perlindungan bagi perempuan dan anak agar korban mendapatkan kemudahan untuk mengakses layanan dari UPTD PPA jika ada masyarakat yang mengalami tindak kekerasan.

Adapun petugas memberikan layanan sebagai berikut :

- 1. Rehabilitasi sosial
- 2. Pendampingan dan bantuan hukum
- 3. Pemulangan dan reintegrasi

- 4. Layanan medis
- 5. Medikolegal
- 6. Psikososial
- 7. Penyediaan UPTD PPA
- 8. Pelatihan kemandirian

Data kasus kekerasan perempuan dan anak yang melapor ke UPTD PPA/P2TP2A Tahun 2021 sd 2024

NO.	TAHUN	JUMLAH KORBAN ANAK	Kategori Kasus						JUMLAH KORBAN PEREMPUAN	Kategori Kasus					
			fisik	psikis	Sek sual	Penel an taran	Traffic king	lainnya		fisik	psikis	Sek sual	Penel an taran	Traffi cking	lainn ya
1.	2021	13	-	-	11	-	-	2	8	4	3	1	-	-	-
2.	2022	68	5	21	19	1	4	18	18	3	10	3	1	-	1
3.	2023	44	13	6	20	3	2	2	15	8	3	2	1	-	1
4.	2024	37	4	7	22	3	-	-	12	5	2	4	-	1	-

Sumber Data : Bidang PA dan Bidang PPPUG

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa di Tahun 2024 lebih sedikit kasus yang ditangani dari pada tahun sebelumnya, hal ini disebabkan program yang sudah berjalan dengan baik.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Disadari sepenuhnya dalam era otonomi daerah, walaupun tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan secara umum telah dilaksanakan sepenuhnya namun dalam tahun 2021 hal-hal yang masih memerlukan perhatian secara khusus antara lain :

1. Salah satu dampak dari era otonomi adalah terjadinya mutasi personil baik keluar maupun kedalam struktur kelembagaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, terutama petugas lapangan KKBPK (Koordinator dan Penyuluh KKBPK) dan tenaga atau pejabat baru yang memerlukan pelatihan / orientasi program KKBPK dan Pemberdayaan Perempuan.
2. Perlu dilakukan pemantapan kerjasama dan kemitraan dengan instansi terkait, organisasi profesi, pihak swasta, LSOM serta mitra lainnya untuk mendukung pengelolaan dan pelaksanaan program KKBPK dan Pemberdayaan Perempuan.
3. Perlu dikembangkan model pendekatan pelayanan program KB / KR dan program pemberdayaan perempuan dan keluarga yang lebih efektif, terutama pelayanan bagi keluarga miskin dan penduduk rentan lainnya
4. Keberadaan Kampung KB yang relatif masih baru memerlukan perhatian khusus agar keberadaannya dapat memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya dalam memberikan informasi dan edukasi tentang Program KKBPK.
5. Maraknya pergaulan bebas, kehamilan diluar nikah dan kenakalan remaja akhir-akhir ini menjadi tantangan bagi KKBPK dan Pemberdayaan Perempuan yang cukup berat untuk diselesaikan. Untuk itu dukungan dari semua pihak sangat-sangat diharapkan untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Semua ini memerlukan dukungan dan peran aktif semua elemen terkait serta partisipasi masyarakat.

Adapun faktor penghambat pencapaian kinerja DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto berdasarkan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

a) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Belum semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merencanakan program/kegiatan pembangunan berorientasi pada data basis kependudukan.

2. Belum semua Pasangan Usia Subur (PUS) memahami masalah kesehatan reproduksi, utamanya akibat dari kehamilan atau melahirkan yang terlalu muda, terlalu tua, terlalu rapat dan terlalu banyak (4-T), sehingga dapat berdampak kurang baik terhadap kesehatan Ibu dan anak yang dilahirkan.
3. Peran dan fungsi Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD kurang maksimal dalam membantu pelaksanaan program di tingkat desa atau dusun, karena sering terjadinya pergantian petugas PPKBD dan Sub PPKBD dan banyak yang merangkap menjadi kader lain, sehingga berpengaruh pada tingkat kemampuan dan pemahaman serta kinerja terhadap program.
4. Belum semua kader BKR dan PIK R memahami tentang program Genre terutama triad KRR (pernikahan dini, seks pra nikah, napza) sehingga berdampak pada kesehatan reproduksi remaja.
5. Pemahaman keluarga tentang pendidikan balita serta kesejahteraan dan kesehatan lansia masih kurang sehingga kegiatan BKB dan BKL kurang optimal.
6. Jumlah petugas lapangan KB sangat kurang untuk mendukung operasional pelaksanaan program di lapangan, sehingga sangat mempengaruhi hasil capaian kinerja program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBP).

b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Sekretariat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) masih menjadi satu dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2)
2. Shelter atau titipan sementara belum berfungsi secara optimal
3. Masih kurangnya pelatihan peningkatan kapasitas dalam bidang Konvensi Hak Anak (KHA) dan Perlindungan Perempuan
4. Masih banyak P2TP2A tingkat kecamatan yang tidak berfungsi dan tidak melaporkan kejadian yang ada
5. Masih banyak Gugus Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Desa yang belum berfungsi secara optimal.
6. Masih kurangnya pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) kepada mitra kerja.

7. Belum adanya data terpilah tentang gender.

Sedangkan Isu – Isu strategis strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode Focussed Group Discussion (FGD). Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesetaraan gender dalam masyarakat.
2. Meningkatnya perlindungan anak dari pelecehan seksual dan tindak kekerasan.
3. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan.
4. Bertambahnya kualitas perempuan dalam bidang Pendidikan, kesehatan dan Ekonomi.
5. Bertambahnya usia perkawinan ideal.
6. Berambahnya kesadaran masyarakat untuk ikut KB.
7. Bertambahnya jumlah keluarga yang menjadi kelompok tribina (BKB, BKR, BKL).
8. Bertambahnya kesejahteraan keluarga.
9. Bertambahnya kualitas media dan advokasi dan KIE KB.
10. Bertambahnya kualitas data yang cepat dan akurat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto pada TA. 2025 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
(Tabel T-C. 31 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun Anggaran 2025
Kabupaten Mojokerto

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	DP2KBP2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,28 (A)	5.771.800.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	DP2KBP2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,28 (A)	5.771.800.000	
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DP2KBP2	Prosentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai Target	90%	12.700.000	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DP2KBP2	Prosentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai Target	90%	12.700.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DP2KBP2	Prosentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	89%	5.302.748.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DP2KBP2	Prosentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	89%	5.302.748.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DP2KBP2	IP ASN Perangkat Daerah	65,57%	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DP2KBP2	IP ASN Perangkat Daerah	65,57%	-	

	Administrasi Umum Perangkat daerah	DP2KBP2	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 %	176.729.600	Administrasi Umum Perangkat daerah	DP2KBP2	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 %	176.729.600	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DP2KBP2	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	90%	139.622.400	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DP2KBP2	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	90%	139.622.400	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DP2KBP2	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	90%	140.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DP2KBP2	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	90%	140.000.000	
2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DP2KBP2	Prosentase kelembagaan daerah yang responsif gender	85,71%	53.200.000	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DP2KBP2	Prosentase kelembagaan daerah yang responsif gender	85,71%	255.500.000	
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah OPD yang melaksanakan anggaran responsif gender	86 OPD	24.900.000	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah OPD yang melaksanakan anggaran responsif gender	86 OPD	24.900.000	
	Pembedayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan	DP2KBP2	Jumlah PEKKA dan Perempuan Korban Kekerasan yang dilatih Berwirausaha	40 Orang	23.800.000	Pembedayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah PEKKA dan Perempuan Korban Kekerasan yang dilatih Berwirausaha	40 Orang	88.300.000	

	Kabupaten/Kota										
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah organisasi wanita dan lembaga penyedia layanan yang mendapat pembinaan	90 orang	-	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah organisasi wanita dan lembaga penyedia layanan yang mendapat pembinaan	90 orang	142.200.000	
3	Program Perlindungan Perempuan	DP2KBP2	Prosentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan	100%	76.800.000	Program Perlindungan Perempuan	DP2KBP2	Prosentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan	100%	456.800.000	
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah lintas sektor yang berperan aktif dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan atau TPPO	65 orang	6.040.000	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah lintas sektor yang berperan aktif dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan atau TPPO	65 orang	456.800.000	
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah Mitra Kerja / Jejaring yang Dapat Bersinergi dengan P2TP2A	15 Mitra Kerja / Jejaring	58.800.000	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah Mitra Kerja / Jejaring yang Dapat Bersinergi dengan P2TP2A	15 Mitra Kerja / Jejaring	108.800.000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia	DP2KBP2	Jumlah kebutuhan rumah aman dan jumlah	43 Orang	11.960.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia	DP2KBP2	Jumlah kebutuhan rumah aman dan jumlah	43 Orang	251.960.000	

	Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		petugas yang tercukupi dan cakap dalam pendampingan			Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		petugas yang tercukupi dan cakap dalam pendampingan			
4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	DP2KBP2	Prosentase OPD yang memiliki data terpilah gender dan anak	97,92%	26.000.000	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	DP2KBP2	Prosentase OPD yang memiliki data terpilah gender dan anak	97,92%	40.980.000	
	Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyaji Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah profil gender dan anak yang disusun	1 buku	26.000.000	Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyaji Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah profil gender dan anak yang disusun	1 buku	40.980.000	
5	Program Pemenuhan Hak Anak	DP2KBP2	Prosentase kecamatan layak anak	50%	29.000.000	Program Pemenuhan Hak Anak	DP2KBP2	Prosentase kecamatan layak anak	50%	50.932.500	
			Prosentase desa kelurahan layak anak	14,47%				Prosentase desa kelurahan layak anak	14,47%		
	Pelembagaan PHA dan Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah kecamatan dan desa yang memahami PHA	136 Orang	11.000.000	Pelembagaan PHA dan Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah kecamatan dan desa yang memahami PHA	136 Orang	32.932.500	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga	DP2KBP2	Jumlah jejaring yang bersinergi dalam	175 orang	18.000.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga	DP2KBP2	Jumlah jejaring yang bersinergi dalam	175 orang	18.000.000	

	Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		pemenuhan hak anak di Kabupaten Mojokerto			Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		pemenuhan hak anak di kabupaten Mojokerto			
6	Program Perlindungan Khusus Anak	DP2KBP2	Prosentase korban anak dan ABH (anak yang berhadapan dengan hukum) yang mendapatkan layanan	100%	95.000.000	Program Pemenuhan Hak Anak	DP2KBP2	Prosentase korban anak dan ABH (anak yang berhadapan dengan hukum) yang mendapatkan layanan	100%	199.000.000	
	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah lintas sektor dan remaja yang berperan aktif dalam pencegahan terhadap anak atau TPPO	30 orang	8.500.000	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah lintas sektor dan remaja yang berperan aktif dalam pencegahan terhadap anak atau TPPO	30 orang	8.500.000	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah Jejaring dan petugas yang bersinergi dengan P2TP2A dan anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan	125 Orang	18.500.000	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah Jejaring dan petugas yang bersinergi dengan P2TP2A dan anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan	125 Orang	18.500.000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan	DP2KBP2	Jumlah Kepala Desa yang Memahami Desa Layak Anak	108 orang	68.000.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan	DP2KBP2	Jumlah Kepala Desa yang Memahami Desa Layak Anak	108 orang	84.000.000	

	Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
7	Program Pengendalian Penduduk	DP2KBP2	Prosentase Data Program Bangga Kencana dan Data Keluarga yang dilaporkan	100 %	1.462.400.000	Program Pengendalian Penduduk	DP2KBP2	Prosentase Data Program Bangga Kencana dan Data Keluarga yang dilaporkan	100 %	1.462.400.000	
	Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	DP2KBP2	Jumlah Petugas KKBPK dan Lintas Sektor yang Melaksanakan Koordinasi Program KKBPK	100 Org	30.000.000	Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	DP2KBP2	Jumlah Petugas KKBPK dan Lintas Sektor yang Melaksanakan Koordinasi Program KKBPK	100 Org	30.000.000	
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah perkiraan pengendalian penduduk tahun 2021 yang di petakan	1.169.760 Jiwa	1.432.400.000	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah perkiraan pengendalian penduduk tahun 2021 yang di petakan	1.169.760 Jiwa	1.432.400.000	
8	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	DP2KBP2	Prosentase PUS yang mendapat pelayanan Keluarga Berencana	80,58%	6.779.868.000	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	DP2KBP2	Prosentase PUS yang mendapat pelayanan Keluarga Berencana	80,58%	7.452.610.800	
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi,	DP2KBP2	Jumlah media komunikasi	50 media komunikasi	1.662.800.000	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi,	DP2KBP2	Jumlah media komunikasi	50 media komunikasi	1.662.800.000	

	Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		program KKBPK			Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		program KKBPK			
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	DP2KBP2	Jumlah PLKB yang Mendapat Pembinaan Program KKBPK	60 Org	2.952.168.000	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	DP2KBP2	Jumlah PLKB yang Mendapat Pembinaan Program KKBPK	60 Org	3.461.568.000	
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi yang terdistribusikan serta pelaksanaan pelayanan KB di Kabupaten Mojokerto yang terlayani sesuai SOP	26.929 alkon	1.562.150.000	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi yang terdistribusikan serta pelaksanaan pelayanan KB di Kabupaten Mojokerto yang terlayani sesuai SOP	26.929 alkon	1.725.492.800	
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	DP2KBP2	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang Mensosialisasikan Program KKBPK	1.828 PPKBD dan Sub PPKBD	602.750.000	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	DP2KBP2	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang Mensosialisasikan Program KKBPK	1.828 PPKBD dan Sub PPKBD	602.750.000	
9	Program Pemberdayaa	DP2KBP2	Prosentase Kelompok	97,91%	5.860.600.000	Program Pemberdayaan	DP2KBP2	Prosentase Kelompok	97,91%	5.860.600.000	

	n dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif			dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif			
	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	DP2KBP2	Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R yang Mendapat Pembinaan	934 Kelompok	430.000.000	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	DP2KBP2	Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R yang Mendapat Pembinaan	934 Kelompok	430.000.000	
	Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	DP2KBP2	Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R yang Mendapat Pembinaan	934 Kelompok	5.430.600.000	Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	DP2KBP2	Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R yang Mendapat Pembinaan	934 Kelompok	5.430.600.000	
JUMLAH					20.154.668.000					21.470.523.700	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam mensukseskan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga berencana (Bangga Kencana) di wilayah Kabupaten Mojokerto terdapat 2 (dua) pemangku kepentingan yang saling mendukung, yaitu Pemerintah dan masyarakat. Sehingga setiap pemangku kepentingan dapat mengusulkan program dan kegiatan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Mojokerto setiap tahunnya. Berikut ini usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan masyarakat dan dunia usaha yang masuk dalam Musrenbang Kabupaten Mojokerto TA. 2026 :

Tabel 2.4
(Tabel T-C. 32 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan TA. 2026
Kabupaten Mojokerto

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

No.	Program/Keg./Sub Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Prosentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif		
	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R yang Mendapat Pembinaan		
	Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	DP2KBP2	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20 Kader	Anggaran akan dipergunakan untuk A. Pelatihan Insan Genre dengan menghadirkan 10 Pengurus Insan Genre, 10 Pengurus PIK R, dan 10 Pembina PIK R B. lomba duta genre 25 Februari 2025 bersama Ibu Ketua TP PKK Kabupaten Mojokerto dengan hasil : - Juara 1 Putra dari SMAN 1

					Ngoro - Juara 2 Putra dari SMAN 1 Dawar - Juara 3 Putra dari SMAN 1 Bangsal - Juara 1 Putri dari SMKN 1 Pungging - Juara 2 Putri dari SMAN 1 Puri - Juara 3 Putra dari SMKN 1 Kemlagi
--	--	--	--	--	--

Pada Musrenbang Kabupaten Mojokerto TA. 2026 ada usulan program dan kegiatan Di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dari masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan nasional mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan makmur. Penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan karena jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan sehingga penduduk menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional, serta mampu bersaing dengan bangsa lain dan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, tujuan pembangunan program KB Nasional di masa mendatang adalah meningkatkan kualitas program KB untuk memenuhi hak – hak reproduksi, kesehatan reproduksi, pemberdayaan keluarga, peningkatan kesejahteraan anak, pemberdayaan perempuan dan pengendalian kelahiran agar terwujudnya keluarga berkualitas.

Dalam Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga yang menitik beratkan bahwa penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan yang berkelanjutan dimana penduduk bukan hanya sebagai obyek pembangunan tapi juga sebagai subyek sekaligus sebagai menikmati pembangunan, maka dalam hal ini :

1. Kualitas penduduk harus dikendalikan
2. Kualitas penduduk harus ditingkatkan
3. Mobilitas penduduk harus diarahkan dan
4. Data penduduk harus tersedia by name by adres

Dalam RPJMD 2025 – 2029 Pemerintah telah menerapkan 8 prioritas pembangunan yang dikenal dengan Astacita yaitu :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

dan yang berkaitan dengan program KB adalah **Astacita ke - 4** “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas”.

Sebagai implementasi dari Astacita tersebut ada Rencana Strategis 2025 - 2029 dan sasaran strategis yang harus di capai dan dilakukan secara bertahap yaitu :

1. Unmed Need masih Tinggi
2. KB MKJP Masih Rendah
3. Tingginya Stunting di Kabupaten Mojokerto
4. Banyaknya Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak
5. Banyaknya Kasus Pernikahan Anak

Untuk mencapai sasaran tersebut perlu dilakukan berbagai upaya antara lain meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB dan kualitas pelayanan UPTD PPA terkait penanganan, pencegahan dan sosialisasi terhadap kekerasan perempuan dan anak secara merata di semua tingkat wilayah.

3.2.Tujuan dan Sasaran Rankir Renja Tahun 2026

a. Tujuan

Maksud dengan disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja ini adalah sebagai arah dan pedoman bagi upaya penyelenggaraan perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto, sehingga para pelaksana pembangunan daerah sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan daerah. Dengan tujuan agar :

- Terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Meningkatnya Pembangunan Gender

b. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 adalah :

- Meningkatnya Kepesertaan Keluarga Berencana
- Menurunnya Kasus Stunting di Kabupaten Mojokerto
- Meningkatnya Perlindungan Perempuan
- Meningkatnya Perlindungan Anak
- Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga penanggulangan bencana tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto menetapkan program-programnya sesuai RPJMD Pemerintah Kabupaten Mojokerto periode 2025 – 2029 dan RKPD Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Adapun Program dan Kegiatan DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari Kegiatan:
 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

- b. Program Perlindungan Perempuan terdiri dari kegiatan :
- Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- c. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak terdiri dari kegiatan :
- Pengumpulan, Pengelolaan, Analisis dan Penyaji Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- d. Program Pemenuhan Hak Anak terdiri dari kegiatan :
- Pelembagaan PHA dan Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup dan Kewenangan Kabupaten/Kota
- e. Program Perlindungan Khusus Anak terdiri dari kegiatan :
- Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- f. Program Pengendalian Penduduk terdiri dari kegiatan :
- Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kualitas Penduduk
 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

- g. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) terdiri dari kegiatan :
- Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya local
 - Pemberdayaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber – KB
- h. Program Pembedayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) terdiri dari kegiatan :
- Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat daerah Kabupaten/Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

TABEL T-C. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Mojokerto
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (RANGAN RENJA 2025)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	14	1				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	DP2KBP2	84,42 (A)	5.771.800.000			85,78 (A)	6.320.587.175
2	14	01	2	01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai Target	DP2KBP2	90%	12.700.000			2 Dokumen	12.700.000
2	14	01	2	01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DP2KBP2	2 Dokumen	7.500.000	DAU		2 dokumen	7.500.000
						Rincian :								
						1. Rapat Evaluasi Kinerja dan rapat realisasi anggaran								

						2. Penggandaan dan penjiilidan dokumen RENSTRA, RENJA, SPPD								
2	14	01	2	01	07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DP2KBP2	1 Laporan	5.200.000	DAU		1 Laporan	5.200.000
						Rincian :								
						Penggandaan dan penjiilidan dokumen Dokumen DPA, RKA, LKJIP dan SPPD								
2	14	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	DP2KBP2	89,00%	5.302.748.000			89%	5.316.344.000
2	14	01	2	02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DP2KBP2	32 orang	5.302.748.000	DAU		32 orang	5.316.344.000
						Rincian :								-
						Pembayaran Gaji dan tunjangan ASN								-
2	14	01	2	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan	DP2KBP2	85,15 (A)	-				-
2	14	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Adribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai DP2KBP2 yang mendapatkan pakaian dinas							
						Rincian :								
2	14	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DP2KBP2	90%	176.729.600			1 Dok	554.332.925
2	14	01	2	06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DP2KBP2	1Paket	20.000.000	DAU		1 Paket	372.423.550
						Rincian :								

						Beli Kursi rapat 35 unit, kursi kerja pejabat 35 unit, Laptop, AC 12 unit, Scan 4 unit, Printer unit, filing kabinet 1 unit, CCTV 1 Unit								
2	14	01	2	06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DP2KBP2	168 Paket	12.000.000	DAU		168 Paket	12.000.000
						Rincian :								
						Makan minum rapat								
2	14	01	2	06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	DP2KBP2	4 Paket	25.000.000	DAU		4 Paket	25.000.000
						Rincian :								
						Cetak map, amplop, blanco dan lembar disposisi								
2	14	01	2	06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	DP2KBP2	6 Dokumen	9.000.000	DAU		6 Dokumen	9.000.000
						Rincian :								
						Beli koran								
2	14	01	2	06	07	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	DP2KBP2	4 Paket	33.729.600	DAU		4 paket	33.721.375
						Rincian :								
						Beli ATK								
2	14	01	2	06	08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	DP2KBP2	12 Laporan	7.000.000	DAU		12 Laporan	7.000.000
						Rincian :								
						Makan minum tamu								

2	14	01	2	06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DP2KBP2	144 Laporan	70.000.000	DAU		144 Laporan	95.188.000
						Rincian :								
						Perjalanan dinas luar dan dalam daerah								
2	14	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	DP2KBP2	90%	139.622.400			2 Keg	219.000.000
2	14	01	2	08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DP2KBP2	12 Laporan	75.000.000	DAU		12 bulan	75.000.000
						Rincian :								
						Bayar listrik dan telpon								
2	14	01	2	08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DP2KBP2	12 Laporan	64.622.400	DAU		12 Laporan	144.000.000
						Rincian :								
						Honor Tenaga Harian Lepas (THL)								
2	14	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milih daerah dalam keadaan baik	DP2KBP2	90%	140.000.000			176 Unit sepeda, 7 mobil	218.210.250
2	14	01	2	09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DP2KBP2	176 Unit sepeda, 7 mobil	105.000.000	DAU		176 Unit sepeda, 7 mobil	143.210.250

						Rincian :								
						Pajak Kendaraan roda dua dan roda 4 dan service kendaraan								
2	14	01	2	09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DP2KBP2	3 Gedung	15.000.000	DAU		3 Gedung	50.000.000
						Rincian :								
						Beli Cat untuk rehab gedung dan beli perlengkapan rumah tangga								
2	14	01	2	09	10	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DP2KBP2	21 Unit	20.000.000	DAU		21 Unit	25.000.000
						Rincian :								
						Service AC 7 buah printer sama PC 14 Unit								
2	08	02				Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Prosentase kelembagaan daerah yang responsif gender	DP2KBP2	85,71%	53.200.000			87,50%	470.000.000
2	08	02	2	01		Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah OPD yang melaksanakan anggaran responsif gender	DP2KBP2	86 OPD	24.900.000			86 OPD	95.000.000

2	08	02	2	01	01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	1 Dokumen	24.900.000	DAU		1 Dokumen	95.000.000
						Rincian :							-	-
						1. Bimtek Relawan SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak) Desa 2. Bimtek PPRG Perangkat Daerah 3. Desk ARG untuk Perangkat Daerah								
2	08	02	2	02		Kegiatan Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PEKKA dan perempuan korban Kekerasan yang dilatih berwiraswasta	DP2KBP2	3 Dokumen	28.300.000			3 Dokumen	175.000.000
2	08	02	2	02	01	Sub Kegiata Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah PEKKA dan perempuan korban Kekerasan yang dilatih berwiraswasta	DP2KBP2	3 Dokumen	28.300.000	DAU		3 Dokumen	175.000.000
						Rincian :								

						1. Pelatihan Wirausaha 2. Peningkatan Kapasitas Perempuan di Bidang Politik 3. Peningkatan Kapasitas Perempuan di Bidang Hukum								
2	08	02	2	03		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah organisasi wanita dan lembaga penyedia layanan yang mendapat pembinaan	DP2KBP2	90 orang	-			90 Orang	200.000.000
2	08	02	2	03	01	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	DP2KBP2	3 Lembaga	-	DAU		3 Lembaga	200.000.000
						Rincian :								
						1. Kegiatan PKK (Pencegahan Perkawinan Anak dan FGD Pembahasan Draft Buku PAAREDJ)								
2	08	03				Program Perlindungan Perempuan	Prosentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan	DP2KBP2	100,00%	76.800.000			100%	950.000.000

2	08	03	2	01		Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah lintas sektor yang berperan aktif dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan atau TPPO	DP2KBP2	65 orang	6.040.000			65 Orang	200.000.000
2	08	03	2	01	01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	1 Dokumen	6.040.000	DAU		1 Dokumen	200.000.000
						Rincian :								
						Pokja Perempuan dan Pokja Masyarakat PUSPA MAJAPAHIT (Sekolah Perempuan, Sekolah Ayah, Workshop Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa)							-	-
2	08	03	2	02		Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Mitra Kerja / Jejaring yang Dapat Bersinergi dengan P2TP2A	DP2KBP2	15 mitra kerja / jejaring	58.800.000			14 mitra kerja / jejaring	150.000.000
2	08	03	2	02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	DP2KBP2	8 Orang	58.800.000	DAU		8 Orang	150.000.000
						Rincian :								

						1. Operasional P2TP2A/ UPTD PPA 2. Honor Fulltimer P2TP2A (Psikolog, Pengacara, Admin)								
2	08	03	2	03		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah kebutuhan rumah aman dan jumlah petugas yang tercukupi dan cakap dalam pendampingan	DP2KBP2	43 Orang	11.960.000			43 Orang	600.000.000
2	08	03	2	03	01	Sub Kegiatan Advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Adokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP3	1 Dokumen	4.600.000	DAU		1 Dokumen	500.000.000
						Rincian :								
						Rincian Kegiatan : Sarana dan Prasarana Shelter dan Sekretariat P2TP2A/UPTD PPA Kabupaten Mojokerto								
2	08	03	2	03	02	Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP3	1 Dokumen	7.360.000	DAU		1 Dokumen	100.000.000
						Rincian :								

						FGD Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan								
2	08	05				Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Prosentase OPD yang memiliki data terpilah gender dan anak	DP2KBP2	97,92%	26.000.000			100%	26.000.000
2	08	05	2	01		Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Profil Gender dan Anak yang Disusun	DP2KBP2	1 buku	26.000.000			1 Buku	26.000.000
2	08	05	2	01	01	Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	DP2KBP2	1 Dokumen	26.000.000	DAU		1 buku	26.000.000
						Rincian :								
						Pelaksanaan Pembuatan Buku Data Gender dan anak								
2	08	06				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Prosentase kecamatan layak anak	DP2KBP2	50,00%	29.000.000			50,00%	100.000.000
							Prosentase desa kelurahan layak anak	DP2KBP2	14,47%				14,47%	
2	08	06	2	01		Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah kecamatan dan desa yang memahami PHA	DP2KBP2	40 Orang	11.000.000			136 Orang	80.000.000

2	08	06	2	01	01	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	DP2KBP2	27 Organisasi	6.000.000	DAU		27 Organisasi	30.000.000
						Rincian :								
						Biaya operasional pembinaan forum anak (Forum Anak Majapahit)								
2	08	06	2	01	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	1 Dokumen	5.000.000	DAU		1 Dokumen	50.000.000
						Rincian :								
						Persiapan dan Pelaksanaan Evaluasi KLA Tingkat nasional								
2	08	06	2	02		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah jejaring yang bersinergi dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten Mojokerto	DP2KBP2	125 Orang	18.000.000			125 Orang	20.000.000

2	08	06	2	02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	95 Anak	9.000.000	DAU		95 Anak	10.000.000
						Rincian :								
						Diperuntukkan Untuk Kegiatan Pelatihan KHA Bagi OPD dan Pelayanan Masyarakat								
2	08	06	2	02	03	Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	1 Dokumen	9.000.000	DAU		1 Dokumen	10.000.000
						Rincian :								
						Diperuntukkan Untuk Kegiatan Pelatihan KHA Bagi Camat dan Kepala Desa								
2	08	07				Program Perlindungan Khusus Anak	Prosentase korban anak dan ABH (anak yang berhadapan dengan hukum) yang mendapatkan layanan	DP2KBP2	42,86%	95.000.000			42,86%	118.500.000
2	08	07	2	01		Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah lintas sektor dan remaja yang berperan aktif dalam pencegahan terhadap anak atau TPPO	DP2KBP2	30 orang	8.500.000			30 orang	118.500.000

2	08	07	2	02	04	Sub Kegiatan Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	DP2KBP2	15 Orang	8.500.000	DAU		15 Orang	50.000.000
						Rincian :								
						Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak bagi petugas KUA								
2	08	07	2	02		Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Jejaring dan petugas yang bersinergi dengan P2TP2A dan anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan	DP2KBP2	125 Orang	18.500.000			125 Orang	18.500.000
2	08	07	2	02	05	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	DP2KBP2	1 Dokumen	10.000.000	DAU		1 Dokumen	100.000.000
						Rincian :								
						Penanganan Kasus								
2	08	07	2	02	06	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	DP2KBP2	10 Orang	8.500.000	DAU		10 Orang	50.000.000

						Rincian :								
						Focus Group Discussion Penanganan Kasus anak di Kabupaten Mojokerto (Kejaksaan, PN, PA, Polres, Polresta, Kementerian Agama dan OPD Terkait)								
2	08	07	2	03		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kepala Desa yang Memahami Desa Layak Anak	DP2KBP2	108 orang	68.000.000			108 Orang	50.000.000
2	08	07	2	02	05	Sub Kegiatan Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	DP2KBP2	1 Kegiatan	60.000.000	DAU		1 Dokumen	50.000.000
						Rincian :								
						Honor Tenaga Sosial dan PPTK								
2	08	07	2	02	07	Sub Kegiatan Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	DP2KBP2	1 Dokumen	8.000.000	DAU		1 Dokumen	50.000.000
						Rincian :								
						Sosialisasi Pencegahan anak di sekolah - sekolah								

2	14	02				Program Pengendalian Penduduk	Prosentase Data Program Bangga Kencana dan Data Keluarga yang dilaporkan	DP2KBP2	100%	1.462.400.000			100%	1.587.400.000
2	14	02	2	01		Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Petugas KKBPK dan Lintas Sektor yang Melaksanakan Koordinasi Program KKBPK	DP2KBP2	100 orang	30.000.000			100 orang	
2	14	02	2	01		Sub Kegiatan Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	DP2KBP2	1 Dokumen	20.000.000	DAU		1 Dokumen	50.000.000
						Rincian :								
						Penyusunan Dokumen GDPK (Jasa Konsultan), Rapat Koordinasi Lintas Sektor, Perjalanan Dinas, ATK, Bahan Cetak								
2	14	02	2	01	19	Sub Kegiatan Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	DP2KBP2	1 Kegiatan	10.000.000	DAU		1 Kegiatan	25.000.000
						Rincian :								

						Sosialisasi Pemangku Kebijakan, MOU dengan satuan pendidikan, pembinaan koordinasi dengan satuan pendidikan, bahan cetak,								
2	14	02	2	02		Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten / Kota		DP2KBP2	1.169.760 jiwa	1.432.400.000			1.169.760 jiwa	1.587.400.000
2	14	02	2	02	12	Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (DAK NON FISIK BIDANG KB)	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	DP2KBP2	1 Laporan	242.400.000	DAK		354 Laporan	242.400.000
						Rincian :								
						1. Operasional Registrasi dan Register Pelayanan KB di Fasyankes			50 Laporan	60.000.000				
						2. Operasional Pelaksanaan Pemutakhiran Data Wilayah kerja			304 Laporan	182.400.000				
2	14	02	2	02	13	Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (APBD dan DAK NON FISIK BOKB)	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	DP2KBP2	38 Dokumen	1.180.000.000	DAK/APBD		38 Dokumen	1.245.000.000
						Rincian :								
						1.Rapat Evaluasi Pengolahan Data dan SIGA, Bahan Cetak, ATK, Perjalanan Dinas, Makan dan Minum Rapat (APBD) Penunjang DAK			1 Dokumen	10.000.000	DAU			

						2. Operasional Pengolahan Data (DAK NON FISIK)			19 Dokumen	90.000.000	DAK			
						3. Dukungan SIGA (sewa langganan internet broadband)			18 Dokumen	1.080.000.000	DAK			
2	14	02	2	02		Sub Kegiatan Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Dibentuknya Rumah Data Kependudukan yang aktif di Kampung KB untuk memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana0 di Sektor Lain	DP2KBP2	18 Unit	10.000.000	DAU		54 Unit	100.000.000
						Rincian :								
						Orientasi Kader Rumah Data Kependudukan, Pengadaan Sarana Prasarana Rumah Dataku di Kampung KB, Perjalanan Dinas,								
2	14	03				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Prosentase PUS yang mendapat pelayanan Keluarga Berencana	DP2KBP2	80,58%	6.779.868.000			80,59%	5.487.435.800
2	14	03	2	01		Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah media komunikasi program KKBPK	DP2KBP2	144 orang	1.662.800.000			50 media komunikasi	1.939.485.600

2	14	03	2	01	02	Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	DP2KBP2	1 Dokumen	-	DAU		1 Dokumen	286.685.600
						Rincian :								
						KIE Program KB dan Kespro								
2	14	03	2	01	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	DP2KBP2	1 Laporan	140.000.000	DAK		1 Laporan	140.000.000
						Rincian :								
						1. Audit kasus Stunting			1 Laporan	80.000.000				
						2. Dukungan Manajemen			1 Laporan	60.000.000				
2	14	03	2	01	10	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (DAK NON FISIK)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	DP2KBP2	54 Laporan	892.800.000	DAK		54 Laporan	892.800.000
						Rincian :								
						1. Operasional Penyuluhan Program dan Pembinaan tenaga lini lapangan			18 Laporan	450.000.000				
						2. Langganan Daya dan Jasa			18 Laporan	54.000.000				
						3. Keamanan dan Pramusaji			18 Laporan	388.800.000				

2	14	03	2	01	11	Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	DP2KBP2	18 Kecamatan	270.000.000	DAK		18 Kecamatan	270.000.000
						Rincian :								
						Mini lokakarya Kecamatan								
2	14	03	2	01	12	Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	DP2KBP2	2 Dokumen	110.000.000	DAK		1 Dokumen	100.000.000
						Rincian :								
						1. Dukungan Media KIE				100.000.000	DAK			
						2. Promosi Melalui Gerak Mupen				10.000.000	DAU			
2	14	03	2	01	14	Sub Kegiatan Advokasi Program Bangga Kencana kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	DP2KBP2	1 Organisasi	250.000.000	DAK		1 Organisasi	250.000.000
						Rincian :								
						Koordinasi TPPS di tingkat Kab/Kota								
2	14	03	2	02		Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB / PLKB)	Jumlah PLKB yang Mendapat Pembinaan Program KKBPK	DP2KBP2	60 Orang	2.952.168.000			60 Orang	3.502.950.200

2	14	03	2	02	01	Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB / PLKB (APBD dan DAK Non Fisik)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	DP2KBP2	2 Organisasi	778.200.000	DAU		2 Organisasi	1.328.982.200
						Rincian :								
						1. Honorarium Rutin PPKBD dan Sub PPKBD selama 6 bulan				778.200.000				
2	14	03	2	02	04	Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	DP2KBP2	304 Orang	912.000.000	DAK		304 Orang	912.000.000
						Rincian :								
						Operasional Pelaksanaan KIE								
2	14	03	2	02	06	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (DAK FISIK)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	DP2KBP2	1 Laporan	1.261.968.000	DAK FISIK		1 Laporan	1.261.968.000
						Rincian :								
						Pembangunan Gedung Alkon								

2	14	03	2	03		Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi yang terdistribusikan serta pelaksanaan pelayanan KB di Kabupaten Mojokerto yang terlayani sesuai SOP	DP2KBP2	26.929 alokon	1.562.150.000			26.929 alokon	1.562.150.000
2	14	03	2	03	01	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (DAK NON FISIK BIDANG KB)	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Saran Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	DP2KBP2	2 Laporan	45.000.000	DAK		2 Laporan	45.000.000
						Rincian :								
						Operasional Distribusi Alokon								
2	14	03	2	03	08	Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya (DAK NON FISIK BIDANG KB)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	DP2KBP2	2 Laporan	22.500.000	DAK		2 Laporan	22.500.000
						Rincian :								
						Operasional Pembinaan Pelayanan KB di Fasyankes								

2	14	03	2	03	03	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (APBD Dan DAK Non Fisik)	Jumlah orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	DP2KBP2	3555 Orang	1.494.650.000			3555 orang	1.494.650.000
						Rincian :								
						1. Honorarium Tenaga Penunjang Kegiatan Peningkatan KB MKJP (Non PNS) (APBD)			19 Orang	228.000.000	DAU			
						2. Penggerakan pelayanan KB MKJP (IUD, Implant, MOP, MOW, Cabut Implan)			3.518 Orang	1.266.650.000	DAK			
2	14	03	2	04		Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi yang terdistribusikan serta pelaksanaan pelayanan KB di Kabupaten Mojokerto yang terlayani sesuai SOP	DP2KBP2	26.929 alokon	602.750.000			1.828 PPKBD dan Sub PPKBD	602.750.000
2	14	03	2	04	02	Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	DP2KBP2	1 Dokumen	3.750.000	DAK		1 Dokumen	3.750.000
						Rincian :								
						Operasional Penguatan Kampung KB di tingkat kab/kota								

2	14	03	2	04	06	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	DP2KBP2	86 Kampung	599.000.000	DAK		86 Kampung	599.000.000
						Rincian :								
						1. Pembekalan Pokja Kampung Keluarga Berkualitas			10 Kampung KB	10.000.000				
						2. Pertemuan Kelompok Kerja di Kampung Keluarga Berkualitas			38 Kampung KB	114.000.000				
						3. Operasional Ketahanan Keluarga kelompok kegiatan			38 Kampung KB	475.000.000				
2	14	04				Program Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Prosentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif	DP2KBP2	97,91%	5.860.600.000			97,97%	6.078.600.000
2	14	04	2	02		Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R yang Mendapat Pembinaan	DP2KBP2	1.066 Kelompok	5.860.600.000			1066 Kelompok	6.078.600.000
2	14	04	2	01	01	Sub Kegiatan Pengelolaan ketahanan keluarga melalui pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS)	Jumlah Laporan hasil pengelolaan ketahanan keluarga melalui pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS)	DP2KBP2	5 Laporan/Dokumen	48.000.000	DAK		7 Dokumen	48.000.000
						Rincian :								
						Operasional Kegiatan Konseling PPKS di Balai Penyuluhan								

2	14	04	2	01	18	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DP2KBP2	25 Laporan	300.000.000	DAK		25 Laporan	300.000.000
						Rincian :								
2	14	04	2	01	05	Sub Kegiatan Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	Cakupan Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	DP2KBP2	2.586 Laporan	2.586.000.000	DAK		2.586 Laporan	2.586.000.000
						Rincian :								
						Operasional Pencatatan Hasil Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting								
2	14	04	2	01	06	Sub Kegiatan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DP2KBP2	862 Laporan	2.844.600.000	DAK		862 Laporan	2.844.600.000
						Rincian :								
						Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)								
						BKB Kit Stunting								

2	14	04	2	01	19	Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	DP2KBP2	25 Laporan	82.000.000	DAU		25 Laporan	300.000.000
						Rincian :								
						Pembinaan kader BKB, BKR, BKL, PIK R, UPPKA, Insan Genre, Lomba Duta Genre dan Pemberian ATTG untuk UPPKA								
						JUMLAH TOTAL				20.154.668.000				21.138.522.975

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto pada TA. 2026 pada Aplikasi SIPD Kabupaten Mojokerto (usulan prioritas dan cadangan) dengan pagu sementara yang telah ditetapkan oleh BAPPEDA Kabupaten Mojokerto sebesar **Rp. 19.886.628.675,00** (Sembilan Milyard Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1
Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026
Dengan Pagu Sementara Sebagaimana Pada Aplikasi SIPD
Kabupaten Mojokerto

Kode						Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Target	Sumber Dana	Lokasi	Keterangan	Taging Tematik	Dukungan Terhadap Program / Program Prioritas Bupati
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	17	1				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	5.630.488.075		84,60 (A)					
							Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah			97%					
							Indeks Profesionalitas ASN			85,5 (tinggi)					
							Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan			1 inovasi					
2	17	1	2	1		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	5.000.000		100%		DP2KBP2			
2	17	1	2	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3.200.000		2 dokumen	PTAD	DP2KBP2			
						Rincian :									
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		3.200.000	Digunakan untuk mendukung kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran PD (Renstra 2025 - 2029 dan Renja 2026)		PTAD		Kegiatan ini dilakukan untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah untuk Rapat - Rapat Penyusunan Dokumen Perencanaan		

2	17	1	2	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1.800.000		5 laporan	PTAD	DP2KBP2			
						Rincian :									
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		1.800.000	Digunakan untuk mendukung kegiatan penyusunan dokumen Evaluasi Kinerja PD meliputi dokumen LKJIP, LPPD, LKPJ, SAKIP dan Evaluasi Kinerja 3 bulanan		PTAD		Kegiatan ini dilakukan untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah untuk Rapat - Rapat Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja PD		
2	17	1	2	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN	5.097.494.000		100%	DAU				
2	17	1	2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	5.097.494.000		33 orang/bulan	DAU	DP2KBP2			
						Rincian :									
						Belanja gaji pokok PNS		1.980.504.000	Digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan ASN		DAU				
						Belanja gaji pokok PPPK		32.036.000			DAU				
						Belanja tunjangan keluarga PNS		192.316.000			DAU				
						Belanja tunjangan keluarga PPPK		4.486.000			DAU				
						Belanja tunjangan jabatan PNS		126.488.000			DAU				
						Belanja tunjangan fungsional PNS		186.164.000			DAU				
						Belanja tunjangan fungsional umum PNS		37.582.000			DAU				
						Belanja tunjangan umum fungsional umum PPPK		1.850.000			DAU				
						Belanja tunjangan beras PNS		97.889.000			DAU				
						Belanja tunjangan beras PPPK		2.897.000			DAU				
						Belanja tunjangan PPH/ Tunjangan khusus PNS		22.081.000			DAU				

						Belanja tunjangan PPH/ Tunjangan khusus PPPK		500.000			DAU				
						Belanja pembulatan gaji PNS		173.000			DAU				
						Belanja pembulatan gaji PPPK		50.000			DAU				
						Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PNS		4.754.000			DAU				
						Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PPPK		77.000			DAU				
						Belanja iuran jaminan kematian PNS		14.260.000			DAU				
						Belanja iuran jaminan kematian PPPK		231.000			DAU				
						Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PNS		9.903.000			DAU				
						Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PPPK		161.000			DAU				
						Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS		2.281.260.000			PAD				
						Belanja honorarium penanggung jawaban pengelola keuangan		101.832.000			DAU				
2	17	1	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	265.842.505		100%	DAU				
2	17	1	2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket perlengkapan dan peralatan kantor yang disediakan	120.208.280		2 paket	DAU	DP2KBP2			
						Rincian :									
						Baterai Laptop Spesifikasi : Li-ion, 10.8 v, 5200mAh		1.520.800	Belanja kebutuhan Sarpras UPTD PPA (CCTV, Lemari besi, bantal, jam		DAU				

						Jam Dinding Spesifikasi : Digital dimensi 34 x 18 x 6.5 cm		1.287.600	dinding, kursi tunggu, sofa, kasur, kursi roda dll) dan belanja kebutuhan kantor (lemari arsip, laptop, PC, Kursi Kerja, AC, kipas angin, microfon dll untuk ruang pertemuan)		DAU				
						Bantal Spesifikasi : Pillow premium, bahan bulu angsa sintetis		1.498.500			DAU				
						Baterai Spesifikasi : Tanggung		1.035.000			DAU				
						Lemari Arsip Spesifikasi : Besi		3.493.200			DAU				
						Lemari Besi Spesifikasi : 5 rak pintu kaca geser		6.926.400			DAU				
						CCTV Spesifikasi : 4 Channel (2 Outdoor, 2 Indoor)		5.625.500			DAU				
						Kursi Kerja Pejabat Spesifikasi : Kursi Kerja Pejabat		5.328.000			DAU				
						Kursi Tunggu Spesifikasi : 4 seaters		3.718.500			DAU				
						Sofa Spesifikasi : 3 Dudukan		11.991.500			DAU				
						Kasur Spesifikasi : bahan busa uk. single 120 x 200 x 15		1.687.200			DAU				
						AC Split Spesifikasi : 1,5 PK Split		26.203.650			DAU				
						Kipas Angin Wall Fan Spesifikasi : 12 Inch		494.000			DAU				

						Microphone Spesifikasi : Wireless		4.223.200			DAU				
						Dispenser Spesifikasi : Galon Bawah		1.996.900			DAU				
						Kursi Roda Spesifikasi : Sandaran Dan Dudukan Sponge		3.254.900			DAU				
						Laptop Spesifikasi : Administrasi		26.191.000			DAU				
						Printer Spesifikasi : Multifungsi Print, Scan, Copy, Ecotank, Fax With A...		13.693.600			DAU				
						Karbon Spesifikasi : Pembulatan		38.830			DAU				
2	17	1	2	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	6.100.000		2 paket	PTAD	DP2KBP2			
						Rincian :									
						Biaya Konsumsi (Makan) Spesi		3.660.000	Belanja bahan logistik kantor (kopi, teh dan kue kering)		PTAD				
						Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi : -		2.440.000			PTAD				
2	17	1	2	6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	14.761.100		2 paket	PTAD	DP2KBP2			
						Rincian :									
						Amplop Coklat Spesifikasi : 1/4 Folio		150.000	Belanja pengadaan banner, map dinas, cetak NCR,dan penggandaan		PTAD				
						Lembar Disposisi Spesifikasi : Cetak		2.548.300			PTAD				

						Cetak Map Dinas Spesifikasi : Bahan Kertas Bufalo		5.101.200			PTAD				
						Blanko Spesifikasi : Kertas Folio, Kertas Bufallo		6.961.600			PTAD				
2	17	1	2	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	7.184.400		5 dokumen	PTAD	DP2KBP2			
						Rincian :									
						Tarif Surat Kabar / Koran / Majalah Spesifikasi : Kategori 2		3.336.000	Belanja langganan koran		PTAD				
						Tarif Surat Kabar / Koran / Majalah Spesifikasi : Katego 3		3.848.400			PTAD				
2	17	1	2	6	7	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan / material yang disediakan	67.708.725		4 paket	DAU	DP2KBP2			
						Rincian :									
						Belanja ATK, kertas, tinta printer dan materai		67.708.725	Belanja ATK, kertas, tinta printer dan materai (konsolidasi bidang - bidang)		DAU				
2	17	1	2	6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4.000.000		12 laporan	PTAD	DP2KBP2			
						Rincian :									
						Belanja pengadaan AMDK, Nasi / Kue kotak		4.000.000	Belanja pengadaan AMDK, Nasi / Kue kotak		PTAD				
2	17	1	2	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	45.880.000		100 laporan	PTAD	DP2KBP2			

						Honorarium tenaga supir dan keamanan selama 1 tahun		75.697.920	Honorarium tenaga supir dan keamanan selama 1 tahun		DAU			
2	17	1	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang dilakukan selama 1 tahun	111.453.650		100%	DAU			
2	17	1	2	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	87.629.200		12 unit	DAU	DP2KBP2		
						Rincian :								
						Belanja bahan bakar, pelumas, pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas		87.629.200	Belanja bahan bakar, pelumas, pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas		DAU			
2	17	1	2	9	9	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	10.914.150		2 unit	DAU	DP2KBP2		
						Rincian :								
						Belanja Bahan Bagunan, Perabot, tenaga penanganan sarpras		10.914.150	Belanja alat / bahan perabot kebersihan kantor, tenaga penanganan sarpras		DAU			
2	17	1	2	9	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	12.910.300		70 unit	DAU	DP2KBP2		
						Rincian :								
						Belanja pemeliharaan AC, Komputer / laptop dan printer		12.910.300	Belanja pemeliharaan AC, Komputer / laptop dan printer		DAU			

2	8	2				PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Prosentase kelembagaan daerah yang responsif gender	94.229.400		85,71%					
2	8	2	2	1		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang melaksanakan anggaran responsif gender	18.825.000		57 OPD					
2	8	2	2	1	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	18.825.000		1 Dokumen	PTAD	Kab. Mojokerto		Mendukung APE	Evaluasi PUG dan Evaluasi PPRG
						Rincian :									
						Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi : -		2.000.000	Evaluasi PUG dan Evaluasi PPRG	38 OPD					
						Biaya Konsumsi (Makan) S		3.000.000							
						Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi : -		1.350.000							
						Biaya Konsumsi (Makan) S		900.000							
						Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III /Yang Disetarakan (intern Peran...		900.000							

						Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /Yang Disetarakan (intern Perang...		2.000.000							
						Moderator Lokal Spesifikasi : -		350.000							
						Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Pengawas Pemerintahan Muda/Audit...		2.450.000							
						Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon V dan Fungsional Umum Golongan IV/I...		975.000							
						Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Fungsional Umum Non Pegawai Negeri Sipil		500.000							
						Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota Spesifikasi : Full Day/Half Day		4.400.000							

2	8	2	2	2		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PEKKA, Organisasi Perempuan, Perempuan Kepala Desa dan Perempuan Korban Kekerasan yang dilatih Berwirausaha	58.294.150		40 Orang					
2	8	2	2	2	8	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	58.294.150		40 Orang	PTAD	Kab. Mojokerto		Mendukung Ranham Perempuan/ APE	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Perempuan di Bidang Politik
						Rincian :									
						Biaya Konsumsi (Makan) S		2.400.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Perempuan di Bidang Politik	40 Orang					
						Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi : -		1.600.000							
						Biaya Konsumsi (Makan) S		2.370.000							
						Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) S		1.580.000							
						Biaya Konsumsi (Makan) S		6.000.000							
						Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) S		4.000.000							
						Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi : -		6.000.000							

						Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) S		4.000.000							
						Biaya Konsumsi (Makan) S		1.560.000							
						Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) S		1.040.000							
						Air Mineral Spesifikasi : Kemasan Botol 330 MI		1.053.000							
						Moderator Spesifikasi : -		1.400.000							
						Narasumber Spesifikasi : Pakar, Praktisi, Atau Pembicara Khusus, Profesiona...		6.800.000							
						Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon IV kebawah /yang disetarakan		800.000							
						Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana Diatas Rp. 250 Juta Sd. Rp. 500 Ju...		12.690.000							
						Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota Spesifikasi : Full Day/Half Day		5.000.000							

						Karbon Spesifikasi : Pembulatan		1.150							
2	8	2	2	3		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Wanita dan Lembaga Penyedia Layanan yang Mendapat Pembinaan	17.110.250		54 Orang					
2	8	2	2	3	8	Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	17.110.250		1 Dokumen	PTAD	Kab. Mojokerto		Mendukung Ranham Perempuan dan Anak	Workshop Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital
						Rincian :									
						Narasumber Spesifikasi : Pakar, Praktisi, Atau Pembicara Khusus, Profesiona...		5.100.000	Workshop Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital	54 Orang					
						Moderator Spesifikasi : -		700.000							
						Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana Diatas Rp. 250 Juta Sd. Rp. 500 Ju...		1.410.000							
						Uang harian Spesifikasi : Bantuan transport peserta		6.900.000							
						Karbon Spesifikasi : Pembulatan		250							

						Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota Spesifikasi : Full Day/Half Day		3.000.000							
2	8	3				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Prosentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan	120.784.300		100%					
2	8	3	2	1		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lintas Sektor yang Berperan Aktif Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan atau TPPO	57.784.300		1 Lembaga (PUSPA)					
2	8	3	2	1	4	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	57.784.300		1 Dokumen	PTAD	Kab. Mojokerto		Mendukung Ranham Perempuan dan Anak	Pelaksanaan Sekolah Perempuan dan Sekolah Ayah
						Rincian :									
						Bahan Bakar Spesifikasi : Pertamina (UPTD PPA)		6.123.600							
						Bahan Bakar Spesifikasi : Pertamina (PUSPA)		359.100							
						Karbon Spesifikasi : Pembulatan		1.600							
						Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi : -		1.200.000							
						Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack)		800.000							

						Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi : -		1.350.000						
						Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack)		900.000						
						Narasumber Spesifikasi : Pakar, Praktisi, Atau Pembicara Khusus, Profesiona...		13.600.000						
						Moderator Spesifikasi : -		2.100.000						
						Narasumber Spesifikasi : Pakar, Praktisi, Atau Pembicara Khusus, Profesiona...		13.600.000						
						Moderator Spesifikasi : -		2.100.000						
						Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Pengawas Pemerintahan Madya/Aud...		1.875.000						
						Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Pengawas Pemerintahan Muda/Audit...		1.400.000						
						Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon V dan Fungsional Umum Golongan IV/I...		1.625.000						

						Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Fungsional Umum Non Pegawai Negeri Sipil		750.000						
						Uang harian Spesifikasi : Bantuan transport peserta		10.000.000						
2	8	3	2	2		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Mitra Kerja / Jejaring yang Dapat Bersinergi dengan UPTD PPA	63.000.000		2 Mitra Kerja/Jejaring				
2	8	3	2	2	1	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	63.000.000		3 Orang	DAU	Kab. Mojokerto	Mendukung Ranham	Pendampingan Korban
						Rincian :								
						Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Pegawai Honorer		63.000.000	Honor Tenaga Non PNS	3 Orang	DAU			
2	8	5				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Prosentase OPD yang memiliki data terpilah gender dan anak	24.040.000		96,92%				
2	8	5	2	1		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Profil Gender dan Anak yang Disusun	24.040.000		1 Buku				

2	8	5	2	1	3	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	24.040.000		1 Dokumen	PTAD	Kab. Mojokerto		Mendukung KLA	Membuat Buku gender dan anak
						Rincian :									
						Biaya Konsumsi (Makan) S		6.000.000	Pelaksanaan Pembuatan Buku Data Gender dan anak	50 PD					
						Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesi		4.000.000							
						Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /Yang Disetarakan (intern Perang...		500.000							
						Narasumber Spesifikasi : Pakar, Praktisi, Atau Pembicara Khusus, Profesiona...		1.700.000							
						Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III /Yang Disetarakan (intern Peran...		450.000							
						Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana Diatas Rp. 100 Juta S.D Rp. 250 Ju.		10.890.000							
						Uang harian Spesifikasi : Bantuan transport peserta		500.000							

2	8	6				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Prosentase kecamatan layak anak	51.277.000		100%					
							Prosentase desa kelurahan layak anak			72,37%					
2	8	6	2	1		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan dan desa yang memahami PHA	51.277.000		40 Kecamatan	PTAD				
2	8	6	2	1	5	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	26.952.000		1 Lembaga	PTAD	Kab. Mojokerto		Mendukung KLA	Biaya operasional pembinaan forum anak (Forum Anak Majapahit)
						Rincian :									
						Kaos Peserta Pelatihan/Kaos seragam S		5.552.000	Biaya operasional pembinaan forum anak (Forum Anak Majapahit)	38 Orang					
						Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi : -		7.800.000							
						Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) S		5.200.000							
						Moderator Spesifikasi : -		700.000							
						Moderator Lokal Spesifikasi : -		350.000							

						Moderator Lokal Spesifikasi : -		350.000							
						Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / ...		1.400.000							
						Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /Yang Disetarakan (intern Perang...		500.000							
						Narasumber Spesifikasi : Pakar, Praktisi, Atau Pembicara Khusus, Profesiona...		1.700.000							
						Narasumber Spesifikasi : Pakar, Praktisi, Atau Pembicara Khusus, Profesiona...		1.700.000							
						Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon V dan Fungsional Umum Golongan IV/I...		650.000							
						Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Pengawas Pemerintahan Muda/Audit...		350.000							
						Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Fungsional Umum Non Pegawai Negeri Sipil		500.000							

						Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota Spesifikasi : Full Day/Half Day		200.000							
2	8	6	2	1	9	Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	24.325.000		1 Lembaga	PTAD	Kab. Mojokerto		Mendukung KLA	Pelatihan KHA (Konvensi Hak Anak) untuk OPD secara daring
						Rincian :									
						Biaya Konsumsi (Makan) S		6.000.000	Pelatihan KHA (Konvensi Hak Anak) untuk OPD secara daring						
						Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) S		4.000.000							
						Moderator Lokal Spesifikasi : -		350.000							
						Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /Yang Disetarakan (intern Perang...		500.000							
						Narasumber Spesifikasi : Pakar, Praktisi, Atau Pembicara Khusus, Profesiona...		1.700.000							
						Narasumber Spesifikasi : Pakar, Praktisi, Atau Pembicara Khusus, Profesiona...		3.400.000							

						Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Pengawas Pemerintahan Madya/Aud...		375.000							
						Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Pengawas Pemerintahan Muda/Audit...		1.050.000							
						Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Fungsional Umum Non Pegawai Negeri Sipil		750.000							
						Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota Spesifikasi : Full Day/Half Day		800.000							
						Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota Spesifikasi : Full Day/Half Day		5.400.000							
2	8	7				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Prosentase korban anak dan ABH (anak yang berhadapan dengan hukum) yang mendapatkan layanan	70.350.000		100%					

2	8	7	2	1		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lintas Sektor dan Remaja yang Berperan Aktif dalam Pencegahan Terhadap anak atau TPPO	70.350.000		3 Lintas Sektor (DP2KBP2, Kemenag, Pengadilan Agama)					
2	8	7	2	1	6	Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	13.350.000		1 Dokumen	PTAD	Kab. Mojokerto		Ranham Anak dan KLA	Pendampingan Kasus Anak
						Rincian :			Pendampingan Kasus Anak						
						Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Fungsional Umum Non Pegawai Negeri Sipil		1.000.000		10 Anak					
						Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Pengawas Pemerintahan Madya/Aud...		750.000							
						Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Pengawas Pemerintahan Muda/Audit...		1.400.000							
						Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota Spesifikasi : Full Day/Half Day		4.800.000							

						Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota Spesifikasi : Full Day/Half Day		5.400.000							
2	8	6	2	1	7	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	12.000.000		8 Kegiatan	PTAD	Kab. Mojokerto		Ranham Anak dan KLA	Sosialisai ke sekolah terkait Kekerasan Anak ke Siswa sekolah SD dan SMP
						Rincian :									
						Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Sp		4.800.000	Sosialisai ke sekolah terkait Kekerasan Anak ke Siswa sekolah SD dan SMP	240 Anak					
						Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /Yang Disetarakan (intern Perang...		4.000.000							
						Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon IV /Yang Disetarakan (intern Perang...		3.200.000							
2	8	6	2	1	9	Koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	45.000.000		1 Dokumen	DAU	Kab. Mojokerto		Ranham Anak dan KLA	Honor Tenaga Fultimer
						Rincian :									

						Jasa Tenaga Penanganan Sosial Spesifikasi : Petugas Fulltimer P2TP2A pada DP2KBP2		24.000.000	Honor Tenaga THL (Fultimer)	3 Orang					
						Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi :		18.000.000							
						Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota Spesifikasi : Full Day/Half Day		3.000.000							
2	14	2				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Prosentase Data Program Bangga Kencana dan Data Keluarga yang dilaporkan	1.587.368.800		100%					
2	14	2	2	1		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Petugas Bangga Kencana dan Lintas Sektor yang Melaksanakan Koordinasi Program Bangga Kencana	50.000.000		100 Orang					
2	14	7	2	1	27	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	50.000.000		18 Satuan Pendidikan	PTAD	Kab. Mojokerto			Stunting
						Rincian :									

						Kertas HVS Spesifikasi : Folio/F4 70Gram		2.451.600	Kegiatan Sekolah Siaga Kependudukan di Sekolah Percontohan	18 Sekolah					
						Photo Copy Spesifikasi : Folio/hvs		22.800							
						Roll banner Spesifikasi : ukuran 60 x 160 cm, fronlite 280 gr, rangka almini		5.855.400							
						Biaya Konsumsi (Makan) S		3.000.000							
						Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesi		9.200.000							
						Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /Yang Disetarakan (intern Perang..		500.000							
						Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III /Yang Disetarakan (intern Peran...		450.000							
						Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon IV kebawah /yang disetarakan		1.600.000							
						Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana Sd. Rp. 100 Juta		2.020.000							

						Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Pengawas Pemerintahan Madya/Aud...		3.750.000							
						Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Pengawas Pemerintahan Muda/Audit...		2.100.000							
						Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon V dan Fungsional Umum Golongan IV/I...		3.250.000							
						Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Fungsional Umum Non Pegawai Negeri Sipil		500.000							
						Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota Spesifikasi : Full Day/Half Day		15.300.000							
						Karbon Spesifikasi : Pembulatan		200							

2	14	2	2	2		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Program Bangga Kencana	1.537.368.800		1 Dokumen					
2	14	2	2	2	9	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	60.000.000		1 Laporan	DAK NON FISIK - BOKB	Kab. Mojokerto		Stunting	Stunting
						Rincian :									
						Ballpoint Spesifikasi : Tizo gel		245.700	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 OPD					
						Binder Clip Spesifikasi : Sedang		404.300							
						Karbon Spesifikasi : Pembulatan		4.600							
						Kertas HVS Spesifikasi : Folio/F4 70Gram		12.802.800							
						Materai Spesifikasi : 10000		1.728.000							
						Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Cair 70 Ml		16.434.600							
						Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi : -		1.620.000							
						Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi : -		1.080.000							
						Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -		680.000							

						Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota Spesifikasi : Full Day/Half Day		25.000.000							
2	14	2	2	2	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	242.400.000		1 Laporan	DAK NON FISIK - BOKB	Kab. Mojokerto		Stunting	Stunting
						Rincian :									
						Honor Pelaksanaan Pemutakhiran Data di Wilayah Kerja oleh Kader Spesifikasi : DAK Non Fisik DP2KBP2 Kab. Mojokerto		182.400.000	Operasional Pelaksanaan Pemutakhiran Data Wilayah kerja	304 kelurahan dan desa					
						Honor Petugas Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan KB di Fasyankes Spesifikasi : DAK Non Fisik DP2KBP2 Kab. Mojokerto		60.000.000	Operasional Registrasi dan Register Pelayanan KB di Fasyankes	50 Faskes					
2	14	2	2	2	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1.188.000.000		1 Dokumen	DAK NON FISIK - BOKB	Kab. Mojokerto		Stunting	Stunting
						Rincian :									
						LANGGANAN INTERNET SATELIT Spesifikasi : DAK Non Fisik DP2KBP2 Kab. Mojokerto		1.080.000.000	Dukungan SIGA (sewa langganan internet broadband)	18 Balau Penyuluh KB					
						Transport Pengolah Data Spesifikasi : DAK Non Fisik DP2KBP2 Kab. Mojokerto		108.000.000	Operasional Pengolahan Data	18 Balau Penyuluh KB					

2	14	2	2	2	15	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	26.968.800		10 Unit	PTAD	Kab. Mojokerto		Stunting	Stunting
						Rincian :									
						Photo Copy Spesifikasi : Folio/hvs		68.800	Pengadaan Papan Data Rumah Data Kependudukan di Kampung KB	10 Unit					
						Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi		8.100.000							
						Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi : -		5.400.000							
						Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana Sd. Rp. 100 Juta		10.100.000							
						Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota Spesifikasi : Full Day/Half Day		3.300.000							
2	14	2	2	2	28	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	20.000.000		1 Dokumen	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Mojokerto		Stunting	Stunting
						Rincian :									

						Karbon Spesifikasi : Pambulata		200	Peta Jalan						
						Cetak Buku Spesifikasi : Kertas HVS, 80 Gsm, isi 101- 200 lembar dan Cover		726.000							
						Photo Copy Spesifikasi : Folio/hvs		48.800							
						Biaya Konsumsi (Makan) S		4.500.000							
						Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) S		3.000.000							
						Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /Yang Disetarakan (intern Perang...		500.000							
						Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III /Yang Disetarakan (intern Peran...		450.000							
						Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon IV /Yang Disetarakan (intern Perang...		400.000							
						Narasumber Spesifikasi : Pakar, Praktisi, Atau Pembicara Khusus, Profesiona...		1.700.000							

						Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon IV kebawah /yang disetarakan		800.000							
						Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Pengawas Pemerintahan Madya/Aud...		1.125.000							
						Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon V dan Fungsional Umum Golongan IV/I...		1.950.000							
						Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota Spesifikasi : Full Day/Half Day		4.800.000							
2	14	3				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prosentase PUS yang mendapat pelayanan Keluarga Berencana	6.144.375.000		80,58%					
2	14	3	2	1		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah media komunikasi program Bangga Kencana	1.621.455.000		2 Medi komunikasi (cetak dan elektronik)					
2	14	3	2	1	8	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	4.455.000		1 Laporan	PTAD	Kab. Mojokerto		Stunting	Stunting
						Rincian :									

						Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -		680.000	Penunjang DAK Fisik	1 Dokumen					
						Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Pengawas Pemerintahan Madya/Aud...		750.000							
						Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Pengawas Pemerintahan Muda/Audit...		700.000							
						Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon V dan Fungsional Umum Golongan IV/I...		325.000							
						Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota Spesifikasi : Full Day/Half Day		2.000.000							
2	14	3	2	1	10	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	882.000.000		18 Laporan	DAK NON FISIK - BOKB	Kab. Mojokerto		Stunting	Stunting
						Rincian :									

						Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi : -		118.800.000	Operasional Penyuluhan Program dan Pembinaan tenaga lini lapangan	18 Balai Penyuluh					
						Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) S		79.200.000							
						Honor Fasilitator Spesifikasi : DAK Non Fisik Dp2Kbp2 Kabupaten Mojokerto		72.000.000							
						Tenaga Jasa Keamanan Balai Penyuluhan KB DP2KBP2 Spesifikasi : DAK Non Fisik DP2KBP2 Kab. Mojokerto		194.400.000	Jasa keamanan dan pramusaji di Balai Penyuluhan KB	18 Balai Penyuluh					
						Tenaga Jasa Pramusaji Balai Penyuluhan KB DP2KBP2 Spesifikasi : DAK Non Fisik DP2KBP2 Kab. Mojokerto		194.400.000							
						Tarif Listrik Prabayar 1301 s.d 2200 Spesifikasi : Golongan Tarif P-1		43.188.480							
						Karbon Spesifikasi : Pembulatan		11.520							

						Biaya Transport Peserta BOKB Spesifikasi : DAK NON FISIK DP2KBP2 KABUPATEN MOJOKERTO		180.000.000							
2	14	3	2	1	11	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	360.000.000		10 Laporan	DAK NON FISIK - BOKB	Kab. Mojokerto		Stunting	Stunting
						Rincian :									
						Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi : -		91.800.000	Mini lokakarya Kecamatan	18 Kecamatan					
						Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Sp		61.200.000							
						Honor Fasilitator Spesifikasi : DAK Non Fisik Dp2Kbp2 Kabupaten Mojokerto		72.000.000							
						Biaya Transport Peserta BOKB Spesifikasi : DAK NON FISIK DP2KBP2 KABUPATEN MOJOKERTO		135.000.000							

2	14	3	2	1	12	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	125.000.000		1 Dokumen	DAK NON FISIK - BOKB	Kab. Mojokerto		Stunting	Stunting
						Rincian :									
						Banner Spesifikasi : Bahan Fronlite 280 Gr		70.564.600	Dukungan Media KIE	1 OPD					
						Leaflet Spesifikasi : Flyer Ukuran A4, Cetak Full Colour bahan Art Pape...		45.000.000							
						Poster A3 Spesifikasi : Uk A3, Cetak 1 Muka, Full Warna		3.020.000							
						Publikasi Elektronik (Radio, Dll) S		6.412.000							
						Karbon Spesifikasi : Pembulatan		3.400							
2	14	3	2	1	14	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah unit usaha mikro yang terdata	250.000.000		1 Organisasi	DAK NON FISIK - BOKB	Kab. Mojokerto		Stunting	Stunting
						Rincian :									
						Biaya Konsumsi (Makan) S		47.220.000	Koordinasi TPPS di tingkat Kab/Kota	1 OPD					

						Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) S		31.480.000							
						Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /Yang Disetarakan		8.000.000							
						Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / ...		9.800.000							
						Narasumber Spesifikasi : Pakar, Praktisi, Atau Pembicara Khusus, Profesiona...		8.500.000							
						Uang harian Spesifikasi : Bantuan transport peserta		145.000.000							
2	14	3	2	2		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah PLKB yang Mendapat Pembinaan Program Bangga Kencana	1.961.270.000		54 Orang					
2	14	3	2	2	4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.070.650.000		304 Kader	DAK NON FISIK - BOKB			Stunting	Stunting
						Rincian :									
						Ballpoint Spesifikasi : Tulis		43.472.000	Operasional Program Bangga Kencana oleh Kader	304 kelurahan dan desa					
						Buku Block Note Spesifikasi : Isi 50 Lembar		43.472.000							

						Map Spesifikasi : Map Plastik Zipper		59.823.000							
						Kertas HVS Spesifikasi : Folio/F4 70Gram		414.048.000							
						Photo Copy Spesifikasi : Folio/hvs		26.800							
						Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Cair 70 ML		509.808.000							
						Karbon Spesifikasi : Pembulatan		200							
2	14	3	2	2	5	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	602.620.000		1 Organisasi	DAU/PTAD			Stunting	Stunting
						Rincian :									
						Biaya Konsumsi (Makan) S		1.080.000		1.828 Orang	PTAD				
						Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) S		720.000			PTAD				
						Honorarium Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Ppkbd) Spesifikasi : N		159.600.000	Honor PPKBD dan Sub PPKBD		PTAD				
						Honorarium Petugas Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub Ppkbd) Spesifika		381.000.000			DAU				

						Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana Di Atas Rp. 2,5 Miliar Sd. Rp. 5 M...		26.520.000			PTAD				
						Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Pengawas Pemerintahan Madya/Aud...		4.500.000			PTAD				
						Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Pengawas Pemerintahan Muda/Audit...		5.950.000			PTAD				
						Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon V dan Fungsional Umum Golongan IV/I...		5.850.000			PTAD				
						Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota Spesifikasi : Full Day/Half Day		17.400.000			PTAD				

2	14	3	2	2	7	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	288.000.000		1 Laporan	DAU			Stunting	Stunting
						Rincian :									
						Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi :		288.000.000	Honor Tenaga PLKB Non PNS						
2	14	3	2	3		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan KB yang Mendapat Distribusi Alkon	2.024.050.000		50 Faskes					
2	14	3	2	3	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	30.000.000		1 Laporan	DAK NON FISIK - BOKB			Stunting	Stunting
						Rincian :									
						Bahan Bakar Spesifikasi : Pertamina		9.000.000	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan	50 Faskes					
						Solar Spesifikasi : Non Subsidi		21.000.000							

									Termasuk Jaringan dan Jejarangnya								
2	14	3	2	3	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.943.050.000		5432 Orang	DAK NON FISIK - BOKB/DAK FISIK			Stunting	Stunting		
						Rincian :			Penggerakan pelayanan KB MKJP (IUD,Implant, MOP, MOW, Cabut Implan)	5790 Akseptor							
						Biaya Konsumsi (Makan) S		450.000				DAK NON FISIK					
						Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) S		300.000									
						Biaya Konsumsi (Makan) S		18.000.000									
						Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Sp		12.000.000									
						Jasa Pelayanan KB Implan Spesifikasi : DAK Non Fisik DP2KBP2 Kab. Mojokerto		525.000.000									
						Jasa Pelayanan KB IUD Spesifikasi : DAK Non Fisik DP2KBP2 Kab. Mojokerto		105.000.000									
						Jasa Pelayanan KB MOP Spesifikasi : Dak Non Fisik DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto		3.000.000									
						Jasa Pelayanan KB MOW Spesifikasi : Dak Non Fisik DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto		507.000.000									

						Jasa Pelayanan KB Pencabutan Implan Spesifikasi : DAK Non Fisik DP2KBP2 Kab. Mojokerto		61.425.000								
						Transport Pembawa Akseptor KB Implan Spesifikasi : Dak Non Fisik DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto		375.000.000								
						Transport Pembawa Akseptor KB IUD Spesifikasi : Dak Non Fisik DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto		75.000.000								
						Transport Pembawa Akseptor KB MOP Spesifikasi : Dak Non Fisik DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto		750.000								
						Biaya Pengganti Tidak Bekerja Spesifikasi : DAK Non Fisik DP2KBP2 Kab. Mojokerto		2.250.000								
						Transport Pembawa Akseptor KB MOW Spesifikasi : Dak Non Fisik DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto		30.000.000								
						Transport Pembawa Akseptor Pencabutan Implan Spesifikasi : Dak Non Fisik DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto		43.875.000								

						IUD KIT Spesifikasi : DAK FISIK DP2KBP2 KABUPATEN MOJOKERTO		184.000.000	Pengadaan IUD KIT	8 Unit	DAK FISIK				
2	14	3	2	3	8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	51.000.000		1 OPD	DAK NON FISIK - BOKB			Stunting	Stunting
						Rincian :									
						Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) S		3.800.000	Operasional Pembinaan Pelayanan KB di Fasyankes	50 Faskes					
						Biaya Konsumsi (Makan) S		5.700.000							
						Biaya Konsumsi (Makan) S		3.000.000							
						Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) S		2.000.000							
						Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota Spesifikasi : Full Day/Half Day		19.000.000							
						Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota Spesifikasi : Full Day/Half Day		17.500.000							

2	14	3	2	4		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang Berperan dalam Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana)	537.600.000		1828 Orang (PPKBD dan Sub PPKBD)						
2	14	3	2	4	6	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	537.600.000		96 Kampung	DAK NON FISIK - BOKB				Stunting	Stunting
						Rincian :			Operasional penggerakan di kampung KB	96 Kampung KB						
						Biaya Konsumsi (Makan) S		18.810.000								
						Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) S		12.540.000								
						Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) S		1.820.000								
						Biaya Konsumsi (Makan) S		2.730.000								
						Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi : -		129.600.000								
						Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifi		86.400.000								

						Honor Fasilitator Spesifikasi : DAK Non Fisik Dp2Kbp2 Kabupaten Mojokerto		3.200.000							
						Honor Fasilitator Spesifikasi : DAK Non Fisik Dp2Kbp2 Kabupaten Mojokerto		800.000							
						Uang harian Spesifikasi : Bantuan transport peserta		56.700.000							
						Uang harian Spesifikasi : Bantuan transport peserta		9.000.000							
						Transport Rapat Kampung KB Spesifikasi : Dak Non Fisik DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto		216.000.000							
2	14	4				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Prosentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif	6.163.716.100		97,91%					
2	14	4	2	1		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R yang Mendapat Pembinaan	294.516.100		934 Kelompok					
2	14	4	2	1	16	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	8.195.000		1 Laporan	PTAD	Kab. Mojokerto		Stunting	Stunting
						Rincian :									

						Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana Di Atas Rp. 1 Milliar Sd. Rp. 2,5 ...		3.820.000	Pembinaan duta genre	20 Orang					
						Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Pengawas Pemerintahan Muda/Audit...		1.750.000							
						Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Fungsional Umum Golongan II/I		1.375.000							
						Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Fungsional Umum Non Pegawai Negeri Sipil		1.250.000							
2	14	4	2	1	18	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	130.000.000		10 Unit	DAK NON FISIK - BOKB	Kab. Mojokerto		Stunting	Stunting
						Rincian :									
						BKB KIT STUNTING Spesifikasi : DAK Non Fisik DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto		130.000.000	BKB Kit Stunting	10 Desa					

2	14	4	2	1	19	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	36.321.100		30 Orang	PTAD	Kab. Mojokerto		Stunting	Lomba Duta Genre
						Rincian :									
						Set piala dan trophy Spesifikasi : Isi 3 buah; masing-masing untuk juara 1, 2, dan 3		1.645.400	Lomba Duta Genre						
						Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) S		3.600.000							
						Biaya Konsumsi (Makan) S		1.320.000							
						Sewa Baju Adat Spesifikasi : Baju Adat Mojokertoan		6.979.000							
						Seragam Spesifikasi : Kaos Lengan Panjang		7.190.000							
						Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Orang hari		500.000							
						Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan S		2.500.000							
						Sewa Taman Dekorasi S		1.576.700							

						Biaya Hadiah Lomba Juara 1 Spesifikasi : Kategori Perorangan ; Kesiswaan ; Non Seni/Olahrag...		3.000.000							
						Biaya Hadiah Lomba Juara 2 Spesifikasi : Kategori Perorangan ; Kesiswaan ; Non Seni/Olahrag...		2.500.000							
						Biaya Hadiah Lomba Juara 3 Spesifikasi : Kategori Perorangan ; Kesiswaan ; Non Seni/Olahrag...		2.000.000							
						Juara Harapan 1, 2, Dan 3 Spesifikasi : Lomba di Tingkat Kabupaten		1.200.000							
						Selempang Spesifikasi : beludru, bordir, renda		1.550.000							
						Trophy Spesifikasi : Kecil		760.000							
2	14	4	2	1	21	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	120.000.000		1 Laporan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Mojokerto		Stunting	Stunting
						Rincian :									
						Bahan Bakar Spesifikasi : Pertamina		945.000	Gercep Stunting						

						Solar Spesifikasi : Non Subsidi		1.287.500							
						Map Spesifikasi : Map Plastik Zipper		2.070.000							
						Karbon Spesifikasi : Pembulatan		100							
						Kertas HVS Spesifikasi : Folio/F4 70Gram		3.541.200							
						Photo Copy Spesifikasi : Folio/hvs		17.200							
						Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Cair 70 MI		3.354.000							
						Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi		33.600.000							
						Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi		22.400.000							
						Narasumber Spesifikasi : Pakar, Praktisi, Atau Pembicara Khusus, Profesiona...		13.600.000							
						Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /Yang Disetarakan (intern Perang...		4.000.000							

						Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III /Yang Disetarakan (intern Peran...		3.600.000							
						Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon IV /Yang Disetarakan (intern Perang...		3.200.000							
						Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana Di Atas Rp. 1 Milliar Sd. Rp. 2,5 ...		11.460.000							
						Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Pengawas Pemerintahan Muda/Audit...		3.500.000							
						Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Fungsional Umum Golongan II/I		1.925.000							
						Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Fungsional Umum Non Pegawai Negeri Sipil		1.500.000							
						Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota Spesifikasi : Full Day/Half Day		10.000.000							

2	14	4	2	2		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R yang Mendapat Pembinaan	5.869.200.000		934 Kelompok					
2	14	4	2	2	5	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	2.586.000.000		862 Laporan	DAK NON FISIK - BOKB	Kab. Mojokerto		Stunting	Stunting
						Rincian :									
						Biaya Transport Pencatatan Pengolahan Data TPK Spesifikasi : DAK Non Fisik DP2KBP2		2.586.000.000	Operasional Pencatatan Hasil Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting	2.586 Pendamping					
2	14	4	2	2	6	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	3.103.200.000		1 Laporan	DAK NON FISIK - BOKB	Kab. Mojokerto		Stunting	Stunting
						Rincian :									
						Biaya Transport Pendampingan TPK Spesifikasi : Dak Non Fisik DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto		3.103.200.000	Operasional Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting	862 Tim					

2	14	4	2	2	7	Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	180.000.000		1 Laporan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Mojokerto		Stunting	Stunting
						Rincian :									
						Kertas HVS Spesifikasi : Folio/F4 70Gram		6.197.100	Rembuk Stunting						
						Banner Spesifikasi : Bahan Fronlite 280 Gr		4.081.500							
						Photo Copy Spesifikasi : Folio/hvs		2.800							
						Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Cair 70 ML		3.018.600							
						Biaya Konsumsi (Makan) S		32.400.000							
						Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) S		21.600.000							
						Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /Yang Disetarakan (intern Perang...		9.000.000							
						Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III /Yang Disetarakan (intern Peran...		24.300.000							
						Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Orang hari		5.400.000							

						Uang harian Spesifikasi : Bantuan transport peserta		72.000.000							
						Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota Spesifikasi : Full Day/Half Day		2.000.000							
JUMLAH TOTAL PAGU INDIKATIF								19.886.628.675							

BAB V

P E N U T U P

Penyusunan Rencana Kerja tahun 2026 ini merupakan penjabaran / pelaksanaan dari tugas pokok dan fungsi yang diaplikasikan kedalam rencana kegiatan tahunan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2021 - 2026, Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan tahun 2021 – 2026.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan dan membutuhkan perbaikan. Untuk itu kritik dan saran perbaikan sangat kami harapkan sehingga dimasa depan menjadi lebih baik. Mudah-mudahan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan ini dapat memberikan manfaat bagi public atau masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang telah memberikan mandate kepada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto ini merupakan dokumen perencanaan yang diharapkan dapat memberikan arahan untuk memudahkan pengukuran serta pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto ini disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan dengan menggunakan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan-bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan.

Semoga Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2026 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan

secara konsisten dan berkesinambungan dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih dan berwibawa.

1.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Di dalam Penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Jawa Timur maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten Mojokerto, RPJMD Kabupaten Mojokerto, RKPD Kabupaten Mojokerto.

1.2. Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, upaya yang harus ditempuh dapat melalui

pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencanaan.

2. Aparatur perencanaan yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
3. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
4. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dan dijabarkan dalam Ranwal Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dengan tekad mensukseskan pembangunan di Kabupaten Mojokerto serta adanya dukungan dari semua pihak, kami percaya dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan di pundak kami. Sebagai manusia kami tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan, untuk itu sumbang saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

Mojokerto, Juli 2025

KEPALA DP2KBP2 KAB.MOJOKERTO



SUGENG NURYADI, S.IP.,MM

Pembina Tk. I

NIP. 19681010 198903 1 008